

INDONESIAN MIGRANT WORKER UNION (IMWU)
DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA WANITA
TULUNGAGUNG
DI TAIWAN, SINGAPURA DAN HONGKONG

OLEH
DR. ANDRIANI, S.E., M.M

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2021

BAGIAN I

Fenomena Pekerja Migran Wanita

A. Latar Belakang

Populasi besar Indonesia sebagai yang terbesar ke-4 di dunia, telah memberikan kontribusi terhadap surplus tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja yang besar ini, yang dikombinasikan dengan kelangkaan dan tidak tersedianya pekerjaan di rumah, telah menyebabkan sejumlah orang Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, untuk mendapatkan uang guna memperbaiki ekonomi mereka. Loso dalam penelitiannya menyatakan motif kemauan bekerja diluar negeri untuk meningkatkan taraf perekonomian melalui gaji tinggi yang ditawarkan. Hal tersebut berbeda dengan kondisi di dalam negeri, berbagai faktor menyebabkan masyarakat mengalami stagnasi perekonomian. Seperti faktor upah yang rendah, hingga lapangan kerja yang tersedia sangat sempit.¹

Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa pada tahun 2015 jumlah TKI Indonesia berjumlah 429.872 orang, Negara Singapura dan Hongkong merupakan Negara terbesar tujuan tenaga kerja wanita Indonesia. Pada tahun 2013 lebih dari 73% pekerja Indonesia yang bekerja di Singapura merupakan tenaga kerja wanita, sedangkan di Hongkong 96% . Tahun 2014 sekitar 87% adalah tenaga kerja wanita di Singapura, sedangkan di Hongkong sekitar 97%. Pada tahun 2015 sekitar 97% TKI yang bekerja di Singapura merupakan pekerja wanita, lalu di negara Hongkong sekitar 99% dominasi wanita yang jadi TKI disana.

Penyaluran TKI ke berbagai negara merupakan kerjasama antara dua negara yang dapat mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Walau demikian, keharmonisan kerjasama yang terjalin terkadang harus ada bermacam-macam persoalan terkait tenaga kerja di luar negeri. Telah banyak kasus-kasus yang terjadi pada TKI Indonesia diluar negeri, dengan berbagai bentuk masalah.² Muico sebagai salah satu

¹ Loso, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Pandecta - Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Juli 2010).

² Ibid.

perwakilan badan Internasional Amnesty melaporkan hasil penelitiannya³ dalam meng-*interview* 97 TKI di Hongkong pada tahun 2012-2013 bahwa permasalahan yang dihadapi para TKI sering kali tidak mendapat perhatian oleh para pemegang kebijakan.

Berangkat dari hal tersebut, maka beberapa *non-government organisation* (NGO) pemerhati TKI menjadi aktif. Kami menukil beberapa catatan Ford dan Susilo terkait berdirinya NGO ini.⁴ NGO yang pertama kali berdiri adalah grup feminis yang berfokus terhadap potensi eksploitasi para tenaga kerja domestik wanita. Di pertengahan tahun 2000an, ada lebih dari 100 NGO yang aktif dalam hal tenaga kerja Indonesia. Banyak dari organisasi ini bergabung dengan jaringan nasional seperti *Women's Movement for the Protection of Migrant Workers* (GPPBM) atau *Forum for Justice for Migrant Domestic Workers* (FORKER). Sebagian besar NGO yang berpusat di Jakarta memiliki jaringan regional seperti *Migrant Forum in Asia* dan CARAM Asia. Payung dari organisasi pekerja migran wanita adalah KOPBUMI yang secara aktif berkampanye dan mengadakan dialog dengan pemerintah. Lainnya seperti Solidaritas Perempuan, dengan kepedulian terhadap nasib pekerja Indonesia.

Aktivis yang berasal dari pekerja migran sendiri tidak menutup mata terhadap hal ini. Mereka yang pernah jadi TKI di Hongkong akhirnya juga mendirikan sebuah organisasi. Dengan bantuan KOPBUMI, para aktivis TKI ini mendirikan *National Network of Migrant Workers* (Jarnas BMI). Pada kongres pertamanya di 2003, terbentuk organisasi *Federation of Indonesian Migrant Workers Organisation* (FOBMI). Dua tahun kemudian FOBMI beganti nama menjadi *Indonesian Migrant Workers Union* (IMWU). Presiden pertama SBMI adalah Dina Nuriyati.

Tidak adanya serikat tenaga kerja yang kredibel merupakan permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Dengan sempitnya ruang gerak, para serikat pekerja luar negeri dan organisasi seperti IMWU menjadi tumpuan harapan bagi para TKI. Melalui fenomena tersebut peneliti tertarik membahas tentang “Peranan *Indonesian Migrant Worker Union* (IMWU) terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di Singapura, Taiwan dan Hongkong”.

Banyak penelitian dan kajian sebelumnya terkait TKI yang sudah dilakukan. Beberapa penelitian menganalisis berbagai permasalahan TKI luar negeri dari pra

³ Tom Grundy, “Indonesian Migrant Workers in Hongkong Exploited and Forgotten - Blog,” *HK Helpers Campaign*, last modified Mei 16, 2014, diakses September 22, 2017, <http://hkhelerscampaign.com/en/exploited-and-forgotten/>.

⁴ Michele Ford dan Wahyu Susilo, “Organising for Migrant Worker Hights,” *Inside Indonesia*, last modified April 24, 2010, diakses September 22, 2017, <https://www.insideindonesia.org/organising-for-migrant-55worker-rights>.

penempatan, penempatan dan purna penempatan,⁵ berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS,⁶ belum maksimalnya pelaksanaan SOP dari BNP2TKI dalam menangani kasus yang ada,⁷ peranan pemerintah terhadap nasib para TKI yang bekerja di negara orang.⁸

Berbagai buku yang telah terbit, serta hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait tenaga kerja, belum ada penelitian tentang peranan serikat kerja di luar negeri terhadap kesejahteraan ekonomi TKI. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait hal tersebut dengan mengambil serikat pekerja/organisasi IMWU di Singapura, Taiwan dan Hongkong terhadap kesejahteraan ekonomi pekerja Indonesia yang menjadi TKW di luar negeri.

⁵ Loso, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri."

⁶ Meita Djohan Oelangan, "Implementasi Perjanjian Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri," *Pranata Hukum* 9, no. 1 (2014): 49–61.

⁷ Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May, "Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Jawa Timur dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)" (Skripsi (S1): Universitas Brawijaya, 2013).

⁸ Dewi Trisnawati, Puji Astuti, dan Lusia Astrika, "Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)," *Journal of Politic and Government Studies* 4, no. 2 (2015): 131–145; Hidayat Andyanto dan Dian Novita, "Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Jendela Hukum* 1, no. 1 (2014); Zulfikar Judge, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 171–175; Herdy L. N. Pihang, "Tanggung Jawab 9, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita," *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013): 64–72.

B. Telaah Pustaka

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu:

Tabel 1
Telaah Pustaka

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Donna Savira Larasati, (2018), Journal of International Relations and Government Studies Vol. 4, No. 3, hal 360-366.	Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik <i>Underpayment</i> di Hongkong	Upaya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap para TKI yang bekerja di Hongkong diwujudkan dalam bentuk kebijakan, seperti peraturan terkait ketenagakerjaan bagi TKI. Kebijakan yang ada digunakan sebagai bentuk perlindungan hak-hak untuk para TKI yang bekerja di luar negeri.
2.	Aprilia Restuning Tunggal, (2017), Jurnal Dauliyah, Vol. 2, No. 2, hal 155-179.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi TKI Di Qatar	Perlindungan yang dilakukan pemerintah pada TKI yang bekerja di Qatar berupa pelayanan terpadu untuk para pekerja tersebut. Selain itu, juga terdapat layanan bantuan hukum bagi TKI untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dialami.
3.	Ratu Rayanti Arumsari, (2019), Global Political Studies Jurnal, Vol. 3, No. 1, hal 52-72.	Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal Di Arab Saudi	Kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sebagai bentuk negoisasi penyelesaian ketika terjadi suatu permasalahan dengan TKI. Maka perlindungan yang diberikan berupa bantuan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi TKI di Arab Saudi.
4.	Erwin Lumoring, (2019), Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 6, hal 155-163.	Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri	Menghadapi kasus yang terjadi pada TKI yang bekerja di luar negeri, biasanya pemerintah Indonesia akan memberikan layanan bantuan hukum dan penyelesaian

			masalah yang dihadapi. Selain itu adanya peraturan perundang-undangan terkait TKI, menjadi salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap para pekerjanya yang berada di luar negeri.
5.	Intan Lailatul Mahmudah, (2020), Journal Of Islamic Business Law, Vol. 4, No.4, hal 1-15.	Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Implementasi perlindungan bagi para TKI pada masa pra penempatan telah tertuang dalam Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran. Melalui perlindungan tersebut telah terbukti mengurangi angka kekerasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Proses pendaftaran, hingga menuju pemberangkatan telah diatur sesuai peraturan yang ada.
6.	Ida Hanifah, (2020), De Lega Lata, Vol. 5, No. 1, hal. 10-23	Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri	Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi tenaga kerja di luar negeri, tidak hanya sebatas menciptakan kebijakan saja. Namun harus direalisasikan dalam penyelesaian permasalahan yang menimpa para tenaga kerja tersebut. Selain itu adanya realita kebijakan yang kerap berubah di negara tempat pekerja Indonesia berada, menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasinya. Sehingga hak-hak perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dapat tercapai.
7.	Moh. Nizar, Astiwi Inayah, dan Aman Toto Dwijono, (2010), Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2, hal. 95-111.	Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia	Peran pemerintah dalam perlindungan migran berupa perlindungan sejak proses pemberangkatan, hingga penempatan di negara orang. Sehingga dapat mengurangi modus-modus dari oknum tertentu yang merugikan tenaga kerja Indonesia.

BAGIAN II

Serikat Pekerja dan Kesejahteraan

A. Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Pada dasarnya serikat buruh ini merupakan sebuah organisasi yang terbentuk untuk membela hak-hak pekerja atau buruh, serta kesejahteraan dalam kehidupannya. Serikat ini dapat terbentuk dalam sebuah perusahaan yang menaungi buruh, ataupun diluar perusahaan tersebut. Nilai-nilai yang ditekankan dari terbentuknya serikat buruh ini ialah demokratis, serta penuh tanggung jawab.⁹

Legalitas pembentukan suatu serikat buruh di Indonesia telah didukung oleh beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1956 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak berorganisasi dan Berunding bersama.
2. Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 mengenai Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

⁹ Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Konsep dalam dunia modern konteks akan kesejahteraan di artikan sebagai suatu kondisi seseorang dalam mencukupi berbagai keperluan dalam hidupnya, seperti makan dan minum, tempat tinggal, dan pakaian untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut harus dicari dengan jalan bekerja. Melalui pekerjaan yang layak serta memadai dalam menunjang kualitas hidupnya serta kehidupan sosial. Kesejahteraan menurut Hak Asasi Manusia memiliki arti bahwa setiap manusia baik berbeda gender, berbeda usia memiliki hak akan kelayakan dalam kehidupan seperti kesehatan, sandang, pangan, papan, serta hubungan dengan orang lain disekitar dengan tetap memperhatikan orang lain.¹⁰

Kesejahteraan merupakan indikator penting sebagai perwujudan suatu stabilitas ekonomi dalam negara, maka perlu pembinaan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan akan tercapai ketika individu dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan bersifat materil ataupun kebutuhan non materil lain, dengan harapan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sentosa

2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Pada kehidupan masyarakat, bagian dari indikator sejahtera ialah pada kondisi perekonomiannya. Sehingga kesejahteraan ekonomi menjadi hal penting yang harus diperhatikan, terlebih dalam siklus perekonomian dalam lingkup makro di Indonesia. Termasuk pemerataan perekonomian pada masyarakat, distribusi pendapatan yang adil, maupun kegiatan transaksi lainnya.¹¹

Salah satu tempat terjadinya kegiatan perekonomian ialah pasar, yang merupakan wadah terjadinya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi secara umum biasanya lebih berorientasi pada keuntungan dari transaksi kegiatan yang terjadi di dalam pasar. Apabila di tinjau dari mekanisme yang terjadi di pasar, kesejahteraan sangat sulit untuk ditemukan titik temu. Hal ini dikarenakan penghambat dalam kesejahteraan salah satunya adalah ialah persaingan dalam mencari laba dalam mekanisme pasar, hal ini merupakan suatu kewajiban, mengingat persaingan merupakan sesuatu yang wajib dalam sebuah sistem pasar.

¹⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

¹¹ Lincolin Arsyad, *Teori Ekonomi Mikro: Ikhtisar dan Soal Jawab*, 2 ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1996), 23.

Prinsip rasionalitas dalam bisnis dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu tugas dari adanya ekonomi, dimana orientasi kegiatan ekonomi selain mengarah pada tujuan perorangan melainkan mampu memberikan surplus bagi kesejahteraan komunitas luas dalam suatu negara. Kegiatan perekonomian dalam lingkup suatu pasar, bila berjalan maksimal akan berdampak baik pada siklus ekonomi masyarakat. Namun sebaliknya, akan timbul dampak negatif apabila terjadi ketidakmampuan pengelolaan kegiatan ekonomi akibat dari persaingan yang terjadi dalam pasar apabila ingin mewujudkan ekonomi yang sejahtera. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tentu akan menciptakan persaingan antar satu sama lain yang tujuannya sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan hidup.

Pembangunan suatu kondisi perekonomian sosial perlu diadakannya kajian mengenai ilmu kesejahteraan ekonomi yang mampu memproyeksikan kondisi yang ideal dalam hal kesejahteraan suatu komunitas atau lingkup yang lebih kecil seperti rumah tangga masing-masing individu masyarakat.

3. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi

Sebagai umat muslim maka segala kegiatan kita harus didasarkan pada nilai-nilai syariah sesuai ajaran agama. Termasuk dalam kegiatan perekonomian, maka kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah sangat dianjurkan. Adanya ekonomi syariah ini, maka segala aktivitas didalamnya telah disesuaikan dengan nilai keislaman. Termasuk perwujudan kesejahteraan dalam ekonomi syariah. Atas hal tersebut dapat disimpulkan terdapat dua pandangan terkait kesejahteraan, yaitu:

a. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Pada pandangan ekonomi konvensional berbagai kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk mencapai keinginan pribadi, sehingga pemenuhan kebutuhan materil akan tercapai. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara lain melalui pendekatan Neo-Klasik yang beranggapan bahwa adanya persamaan nilai guna bagi setiap individu masyarakat. Sedangkan pada pendekatan modern yang lebih berkembang, disebutkan bahwa kesejahteraan bukan hanya terpenuhi kebutuhan materil melainkan juga kebutuhan pada Agama.¹²

b. Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Pada sudut pandang ini, telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan dari ekonomi ialah tercapainya kesejahteraan secara holistik, baik secara materi,

¹² Salvatore Dominick, *Mikroekonomi*, 4 ed. (Jakarta: Erlangga, 2007), 56.

spiritual dan moral, sosial dan hukum. Tujuan ini merupakan suatu konsep dari ekonomi syariah itu sendiri. Kesejahteraan Ekonomi dalam pemahaman secara syariah di pandang dalam 3 segi yaitu:

Pertama, dari pengertian sejahtera menurut KBBI dapat berarti “aman sentosa dan makmur; dan selamat.”¹³ Berdasarkan pengertian sejahtera tersebut, sebenarnya terdapat kesamaan dengan pengertian dari “Islam” yang memiliki makna selamat, sentosa, aman, serta damai. melalui pengertian tersebut, mampu menjelaskan adanya misi dalam islam terdapat titik pertemuan dengan kesejahteraan sosial. Harapan terkait tercapainya kesejahteraan merupakan tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk umat muslim, seperti yang telah termaktub dalam Al-Quran berikut ini.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya’ (21): 107).¹⁴

Selanjutnya yang kedua dilihat dari sudut pandang isi, bahwa aspek-aspek yang diajarkan dalam islam terkait dengan kesejahteraan sosial. Ajaran islam mengajarkan tentang keseimbangan hubungan, dimana manusia dalam membangun hubungan dengan Tuhan (*hablum minallaah*) harus seimbang dengan membangun hubungan dengan sosial manusia (*hablum minannas*). Ajaran-ajaran pokok dalam Islam seperti bersyahadat, shalat, puasa, zakat serta berhaji bagi yang mampu, demikian ini semua merupakan perwujudan dalam keimanan serta beramal saleh yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Kemudian yang terakhir yaitu ketiga yang bermakna sebagai usaha dalam merealisasikan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan awal diciptakan manusia dalam aspek kepemimpinan (khalifah) di muka bumi. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa pencapaian akan kesejahteraan sosial di contohkan seperti kehidupan di surga, dimana keharmonisan, kedamaian serta keamanan itu terjamin.¹⁵ Pandangan sejahtera di masa sekarang memiliki konteks akan terhindarnya ketakutan akan penindasan, kekurangan baik sekarang atau masa depan diri sendiri, keluarga, sanak saudara serta lingkungan. Sayyid Quthub

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 1284.

¹⁴ Dep. Agama RI, *Al Quran Terjemah Per Kata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits* (Jakarta: Semesta Al-Qur’an, 2015), a. 21:107.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), 170.

berpendapat bahwa “Dalam islam, sistem kesejahteraan sosial tidak hanya dalam bentuk bantuan secara materi. Bantuan akan materi hanya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia di dunia saja.”¹⁶

4. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Adapun beberapa prinsip kesejahteraan antara lain:

- a. Mendahulukan kepentingan umum untuk diprioritaskan dari yang bersifat individu atau khusus.
- b. Menghilangkan bentuk kesusahan terlebih dahulu dibandingkan memberikan
- c. Hilangnya kerugian kecil akibat dari kerugian yang besar adalah hal yang tidak bisa diterima. Begitu juga mengorbankan manfaat yang besar untuk menerima manfaat yang kecil. Namun sebaliknya, perbuatan yang bisa diterima ketika mengorbankan yang kecil untuk mendapat yang besar manfaatnya dan mengorbankan kerugian besar untuk mendapatkan kerugian yang kecil.

Kerangka etika islam menyebutkan bahwa Kesejahteraan individu akan diakui jika tidak bertentangan kepentingan bersifat umum yang lebih besar manfaatnya serta tidak men-*dhalmi* hak-hak orang lain.

Sehingga faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dalam Al-Qur'an meliputi:

- a. Adanya keadilan dan prinsip persamaan antar manusia.
- b. Adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kegiatan perekonomian
- c. Adanya pemerataan distribusi pendapatan

5. Indikator kesejahteraan

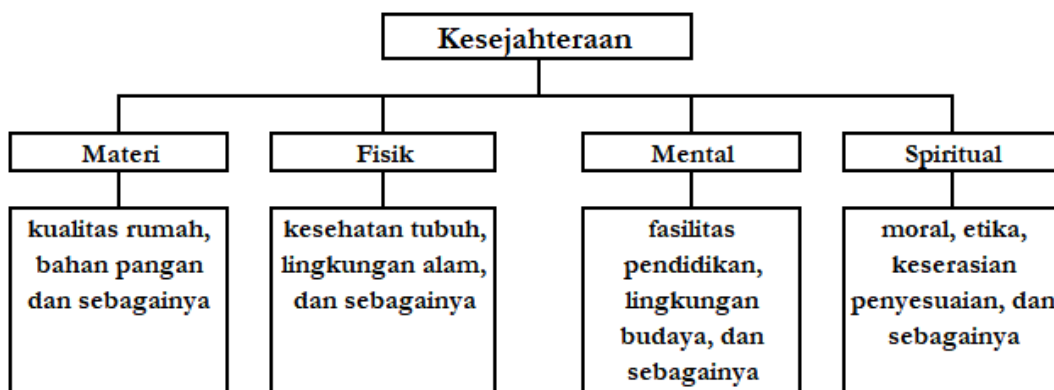
Hakikat kesejahteraan sebenarnya sama dengan konsep martabat manusia yang meliputi empat indikator antara lain:

- a. Merasakan kebebasan (*freedom*) dalam melakukan kegiatan
- b. Merasakan jati diri (*identity*) yang mampu berkembang
- c. Merasakan rasa aman (*security*) dalam hidup
- d. Merasakan Kesejahteraan (*welfare*) dalam menjalani hidup

¹⁶ Sayyid Quthb, *Dirasat Islamiyah* (Kairo: Al-Ma'arif, 1967), 63.

Pengukuran kesejahteraan bagi manusia dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain sebagai berikut:¹⁷

Gambar 1
Pengukuran Kesejahteraan



Realita pada masyarakat saat ini, masih terjadi kesenjangan dari kesejahteraan tersebut. Sedangkan faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut antara lain:

- a. Kondisi ekonomi suatu rumah tangga pada masyarakat
- b. Struktur ekonomi suatu rumah tangga pada masyarakat
- c. Kurangnya pemanfaat potensi yang ada disekitar masyarakat,
- d. Faktor pendukung seperti pihak yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang berjalan dengan maksimal

Bila dikaji lebih dalam, bahwa kesejahteraan ini dapat dinilai berdasarkan persamaan berikut ini:¹⁸

$$W = W (Y, I, P)$$

Dari fungsi diatas bahwasanya kesejahteraan merupakan dilihat dari beberapa faktor yang melandasinya seperti pendapatan (Y); Ketimpangan (I) serta kemiskinan (P). Secara keseluruhan terdapat signifikansi yang berbeda-beda pada masing-masing faktor, pertimbangan secara menyeluruh juga harus dilakukan jika hendak menilai kesejahteraan suatu negara berkembang. Apabila di asumsikan, bahwasanya kesejahteraan sosial (W) akan memiliki korelasi positif dengan pendapatan (Y) akan tetapi berkorelasi negatif dengan kemiskinan (P).

¹⁷ R. Bintarto, *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94.

¹⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development : Pembangunan Ekonomi di Dunia*, 12 ed. (Jakarta: Erlangga, 2014).

6. Tingkatan Kesejahteraan menurut Teori Pareto

Dalam teori Pareto, kesejahteraan sosial merupakan kondisi ketika adanya optimalisasi seorang individu dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, melalui hubungan dengan orang lain sebagai jalan mencapai keinginannya. Keadaan ini akan tercapai pada titik ideal ketika terpenuhi empat kriteria sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya pemerataan konsumsi bagi seluruh masyarakat
2. Adanya pemerataan produksi untuk seluruh masyarakat
3. Kesesuaian pendapatan atas hasil produksi dengan biaya yang dikeluarkan
4. Kesesuaian antara tingkat konsumsi dan pendistribusian hasil produksi pada masyarakat

Beberapa kondisi yang tidak efisien, dimana para ekonom setuju hal itu terjadi, diantaranya: struktur pasar yang tidak sempurna, kegagalan pasar serta teranalitis, diskriminasi harga, dll. Dalam menentukan arah suatu pergerakan aktivitas kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan, kompensasi yang dialami seseorang tidak lebih buruk sehingga bisa bermanfaat pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam penilaian suatu kondisi sejahtera pada masyarakat, kriteria yang umum digunakan ialah kriteria yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam penilaiannya, suatu perubahan yang terjadi pada keadaan tertentu bernilai positif jika perubahan tersebut menyebabkan satu perubahan pada pihak yang diuntungkan serta pihak lain juga tidak dirugikan.

Pengambilan kebijakan dalam suatu perekonomian dengan menggunakan kriteria Pareto, perlu diperhatikan dua hal berikut: *Pareto improvement* dan *Pareto efficient*. Dimana *Pareto improvement* merupakan kondisi dimana keputusan yang diambil masih mampu mengakibatkan satu pihak untuk diuntungkan tanpa membuat yang lain dirugikan. Sedangkan *Pareto efficient*, merupakan suatu kondisi dimana tidak adanya kemungkinan untuk perubahan yang berdampak satu pihak untuk diuntungkan tanpa membuat yang lain dirugikan.

Teori Pareto yang dikenal dalam ekonomi mikro menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan kesejahteraan:

¹⁹ Antoinette Baujard, *Welfare Economics*, GATE Working Paper No. 1333 (Lyon, November 20, 2013), <http://www.ssrn.com/abstract=2357412>; Vilfredo Pareto, *Manual of Political Economy: A Critical and Variorum Edition*, ed. Aldo Montesano, Alberto Zanni, dan Luigino Bruni (London, EN: Oxford University Press, 2014).

1. Pareto Optimal, ketika kesejahteraan pihak satu meningkat akan mengurangi kesejahteraan pihak lain
2. Pareto non-Optimal, ketika kesejahteraan pihak satu meningkat maka tidak mengganggu kesejahteraan yang dialami orang lain
3. Pareto Superior, ketika kesejahteraan pihak satu meningkat maka tidak mempengaruhi pencapaian kesejahteraan yang maksimal dari orang lain. Berdasarkan hal tersebut makat dapat menjelaskan bahwasanya ketika masyarakat dalam keadaan pertama, maka kebijakan-kebijakan tidak akan terjadi.

7. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam pandangan Islam

Menurut pandangan Islam memandang kesejahteraan sebagai jalan untuk ibadah yang tujuan dari akhir dari konsep ini adalah kehidupan yang falah, baik dan terhormat.²⁰ Hal inilah yang membuat berbeda antara kesejahteraan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dengan mendepankan sifat material dan sekuler

Ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

- a. Terpenuhinya kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.²¹
- c. Optimalisasi sumber daya yang ada dengan efisien dan efektif
- d. Pemerataan distribusi segala aspek perkonomian dengan adil
- e. Adanya jaminan kebebasan individu
- f. Persamaan hak setiap individu
- g. Terjalinya kerjasama dan nilai keadilan

Muhammad Umer Chapra dalam pendapatnya yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan khususnya atas permasalahan ekonomi, umat islam tidak perlu terfokus pada timur (sosialis/komunis) serta ke barat (kapitalis) akan tetapi berfokus pada Islam. Pengamatan yang dilakukan Umer Chapra menyebutkan bahwa negara-negara muslim atau yang mayoritas berpenduduk muslim dalam pengembangan ekonominya mengacu pada pendekatan barat dan timur.

²⁰ Mohammad Bektu Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

²¹ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait : BMUI dan Takaful di Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

Chapra berpendapat bahwa penggunaan strategi ekonomi kapitalis serta sosialis di negara-negara muslim, menjadikan masyarakat tidak bisa bersaing dan mengembangkan perekonomian yang lebih unggul dibanding negara kapitalis dan sosialis dimana penekanan serta pencegahan akan penggunaan sumber daya-sumber daya secara otomatis dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini akan berimbas pada sulitnya realisasi tujuan.²²

Dalam konsep negara sejahtera, dimana terdapat *mixing* pada mekanisme harga serta beberapa perangkat yang mendukung. Terlebih pada sektor pembiayaan yang dilakukan oleh negara secara adil untuk kesejahteraan, awalnya menimbulkan optimisme akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Besaran *outcome* pada masyarakat umum yang tidak seimbang pendapatan yang telah dikeluarkan pada berbagai kegiatan perekonomian, meskipun pembebanan akan pajak yang besar tidak berpengaruh pada defisit anggaran yang terjadi. Akibat keadaan ini, menimbulkan keadaan akan buruknya pemakaian sumber-sumber daya yang tersedia, yang mana meningkatkan ketidakseimbangan secara internal maupun eksternal. Permasalahan akan sosial ekonomi seperti kemiskinan serta ketercabutan akan tetap terus-menerus ada bahkan akan semakin dalam yang mana akan berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan tetap sehingga bertambahnya ketidakadilan yang terjadi.

Permasalahan yang terjadi negara sejahtera sekarang ialah bagaimana cara untuk menghapus ketidakseimbangan yang terjadi?. Proses mewujudkan kesejahteraan yang adil dalam meminimalisir kesenjangan sebagai proses yang panjang dan perlu analisis mendalam, serta penghapusan akan ketidakseimbangan yang ada disandarkan pada sistem pasar yang terjadi di dunia secara menyeluruh.²³ BPS telah menjelaskan beberapa indikator untuk menjadi ukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam masyarakat di suatu wilayah Penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan berdasarkan kriteria BPS antara lain adalah:²⁴

²² Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 304.

²³ Ibid., 373 – 374.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020: Welfare Indicators 2020*, ed. Subdirektorat Indikator Statistik (Jakarta, 2020).

Tabel 2
Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Badan Pusat Statistik

Indikator	Kriteria	Indikator
Pendapatan	Tinggi	\geq Rp. 10.000.000,00
	Sedang	Rp. 5.000.000,00
	Rendah	\leq Rp.5.000.000,00
Komsumsi	Tinggi	\geq Rp.5.000.000,00
	Sedang	Rp.1.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00
	Rendah	\leq Rp.1.000.000,00
Keadaan Rumah	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Status kepemilikan, dinding, atap, lantai
Fasilitas Rumah	Lengkap Cukup Kurang	Sarana MCK, Alat elektronik, Kendaraan, perabotan
Kesehatan	Bagus Cukup Kurang	<25% sering sakit 25%-50% sering sakit >50% sering sakit
Kemudahan akses kesehatan	Mudah Cukup Sulit	Adanya pusat layanan kesehatan, dan beberapa penunjang lainnya
Kemudahan akses pendidikan	Mudah Cukup Sulit	Adanya kemudahan akses pendidikan
Kemudahan akses transportasi	Mudah Cukup	Kepemilikan. Fasilitas kendaraan, ongkos kendaraan

	Sulit	
--	-------	--

Sumber : Data diolah dari BPS tahun 2021

BAGIAN III

Gambaran Umum *Indonesian Migrant Worker Union* (IMWU) dan Penyebaran Tenaga Kerja Wanita Tulungagung

A. Gambaran Umum Indonesian Migrant Worker Union (IMWU)

Pada umumnya tidak ada manusia yang mau berada dibawah tekanan orang lain, termasuk perlakuan tidak baik. Pada awalnya terdapat IMWU yang dulu bernama Indonesian Group-Hongkong (IG-HK) pada tahun 1993, dimana aktivitas yang dilakukan organisasi ini ialah melakukan pembelaan pada buruh atas pelanggaran hak-haknya yang dilakukan oleh majikan maupun agen penyalur. Beberapa tahun kemudian kinerja organisasi menunjukkan hal yang positif dengan berkembangnya jumlah anggota yang bergabung dengan organisasi ini. Pada 1999, terdapat keputusan perubahan nama dari organisasi yang sedianya bernama IG-HK menjadi *Indonesian Migrant Worker Union*, yang menjadi nama resmi serikat buruh yang pertama terdaftar di pemerintah Hongkong pada waktu itu. Yang mana pada saat itu anggota *Indonesian Migrant Worker Union* merupakan tenaga kerja dari Indonesia untuk Hongkong.

Jumlah anggota IMWU pada tahun 2004 mencapai 2000 orang. Dalam perjalanannya, organisasi ini sering memimpin perjuangan pekerja migran Indonesia di hongkong untuk memperjuangkan hak buruh yang diperlakukan tidak baik di Hongkong. Adanya beberapa kemenangan yang berhasil diraih sebagai pelecut bagi buruh lain dalam sama-sama memperjuangkan hak buruh migran. Selain organisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang bergerak di berbagai bidang seni budaya, olahraga, keagamaan dan lain sebagainya. Dalam mempererat hubungan antar aliansi tenaga kerja Indonesia yang berada di Hongkong. Selain organisasi tersebut ada pula bentuk organisasi lain bernama Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO).

Koalisi tersebut muncul berkat kerjasama antara 7 organisasi buruh migran Indonesia pada tahun 2000, tepatnya pada bulan desember. dengan berdasarkan kebersamaan, solidaritas dan perasaan senasib. pada awalnya, koalisi ini beranggotakan 7 organisasi BMI hingga ditahun 2008 berkembang dan menjadi 9 organisasi BMI yang bergabung. Tujuan diakan koalisi ini ialah sebagai wadah untuk mempersatukan

organisasi tenaga kerja Indonesia di negara luar, serta aktif membuat aksi sosial dengan mendirikan pusdiklat untuk tenaga kerja Indonesia dan layanan advokasi dan rumah singgah bagi tenaga kerja yang memiliki permasalahan dengan majikan atau agen. Dimana ini merupakan salah satu tugas penting koalisi ini didirikan yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi lain terkait perjuangan terhadap hak buruh di negara Hong-Kong.

Dalam mewujudkan peran organisasi tersebut dalam menciptakan komunikasi antar satu sama lain ialah dengan bergabung menjadi anggota dari *Coalition for Migrant Rights* (CMR), yang merupakan organisasi tenaga kerja dari berbagai negara di Hongkong yang terdiri atas berbagai negara tetangga. Kemudian organisasi ini juga memiliki peran sebagai pelopor dalam *Asian Domestic Workers Alliance* (ADWA) atau organisasi buruh dan tenaga kerja asing dikawasan seluruh Asia.

Visi

“IMWU mencita-citakan tegaknya hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.”

Misi

“Memperjuangkan hak-hak demokratis buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya”

Program IMWU

- a. Melakukan koordinasi pekerja dalam sebuah serikat
- b. Menciptakan serikat pekerta serta mencari anggotanya
- c. Mengelola seluruh biayan pekerja di luar negeri dengan baik
- d. Ikut melindungi para pekerja migran melalui perlindungan atas kebijakan yang ada
- e. Melindungi hak pekerja migran
- f. Mengembangkan organisasi pekerja baik skala lokal, sampai internasional

B. Gambaran Umum Penyebaran Tenaga Kerja Wanita Tulungagung

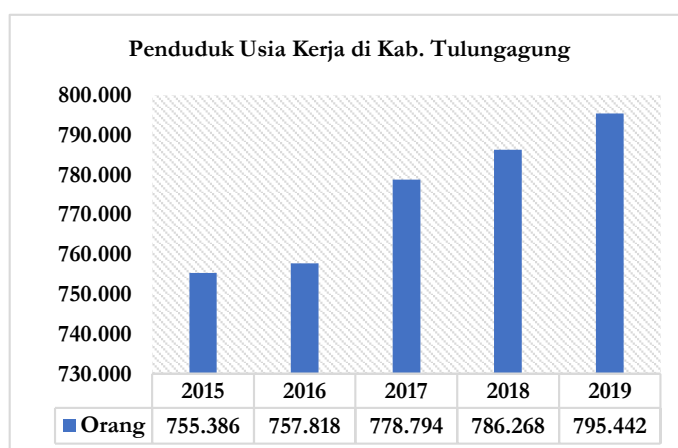
1. Penduduk, Angkatan Kerja dan Penduduk yang Bekerja

Berdasarkan data BPS Kab. Tulungagung, diketahui jumlah penduduk Penduduk Tulungagung pada tahun 2016 sebesar 1.021.190 jiwa, yang terdiri dari 497.689 jiwa penduduk laki-laki dan 523.492 jiwa penduduk perempuan. Penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun sampai 64 tahun) berjumlah 786.268 jiwa terdiri dari laki-laki 377.809 jiwa dan perempuan 404.459 jiwa.

Tabel 3
Penduduk Usia Kerja di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	755.386
2016	757.818
2017	778.794
2018	786.268
2019	795.442

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020

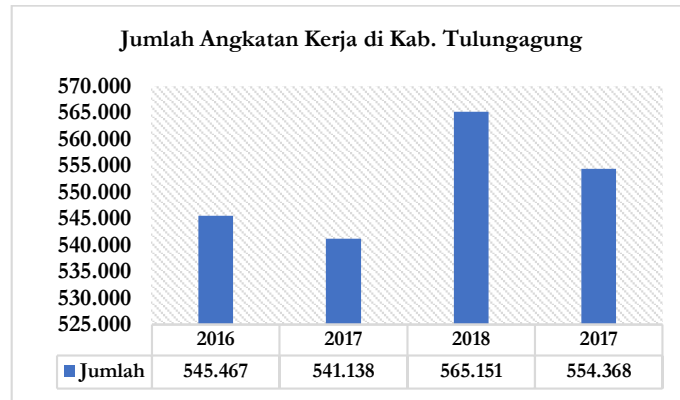


Melalui tabel diatas dapat diketahui selama tahun 2015-2019 terdapat peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 4
Jumlah Angkatan Kerja di Kab. Tulungagung Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah
2016	545.467
2017	541.138
2018	565.151
2019	554.368

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020



Melalui tabel diatas merupakan jumlah angkatan kerja di Kab. Tulungagung tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2017 jumlah angkatan kerja paling tinggi sebanyak 565.151 jiwa dan tahun 2016 terendah sebanyak 545.467 jiwa.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Bekerja di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah
2015	528.123
2016	526.175
2017	551.480
2018	525.867
2019	533.002

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuatif. Tertinggi di tahun 2017 sebanyak 551.480 jiwa bekerja dan terendah di tahun 2018 sebanyak 525.867 jiwa bekerja.

Tabel 6
Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016-2019

Penempatan Tenaga Kerja	2016	2017	2018	2019
AKAD	0	0	0	0
AKAL	45	230	108	150
AKAN	2.960	3.189	3.211	3.461

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020

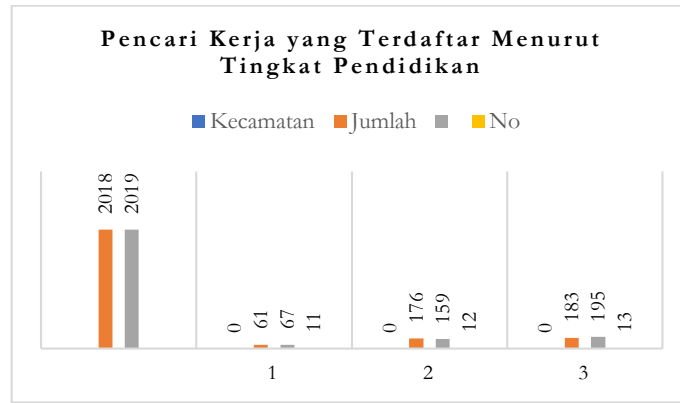


Tabel diatas menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja mengalami perubahan setiap tahunnya. AKAN menempati jumlah tenaga kerja terbanyak dibanding AKAD dan AKAL.

Tabel 7
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pencari Kerja
Tahun 2016-2019

Tingkat Pendidikan	Pencaker yang terdaftar			
	2016	2017	2018	2019
SD/Sederajat	209	329	365	674
SLTP/Sederajat	2.242	2.080	1.701	1.699
SLTA/Sederajat	548	994	1.234	1.680
PT	6	16	9	267
Jumlah	3.005	3.419	3.309	4.320

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2016

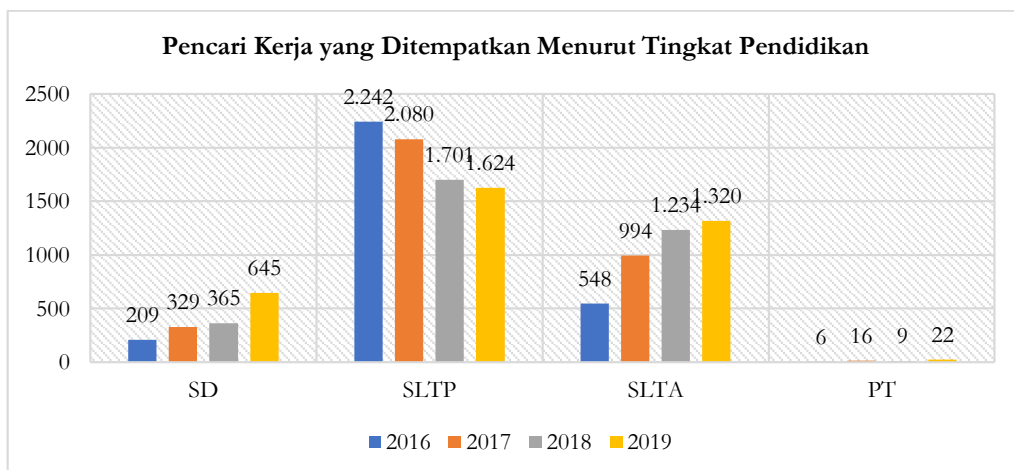


Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pendari kerja didominasi lulusan SLPT sebanyak 2.242 jiwa . Sedang pada tahun 2019 lulusan SLTA sebanyak 1.680 orang hampir sama dengan lulusan SLTP sebanyak 1.699 jiwa.

Tabel 8
Pencari Kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan Tahun 2016-2019

Tingkat Pendidikan	Pencaker yang ditempatkan			
	2016	2017	2018	2019
SD/Sederajat	209	329	365	645
SLTP/Sederajat	2.242	2.080	1.701	1.624
SLTA/Sederajat	548	994	1.234	1.320
PT	6	16	9	22
Jumlah	3.005	3.419	3.309	3.611

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020

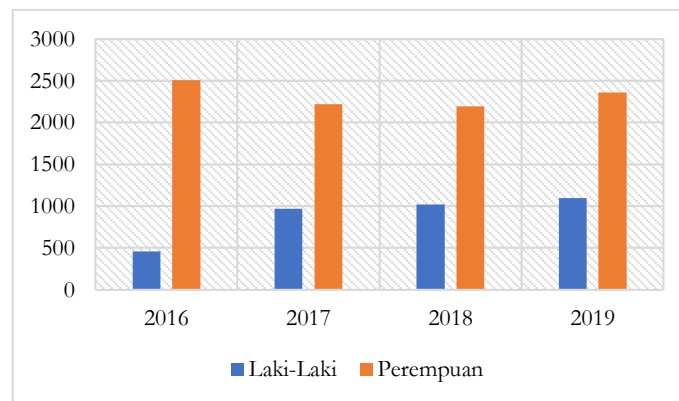


Tabel diatas menunjukkan bawa pencari kerjalulusan SLTP dari tahun 2016 smpat tahun 2019 paling banyak ditempatkan, hal ini sesuai dengan jumlah pencari kerja terbesar dari lulusan SLTP. Sementara lulusan perguruan tinggi sebanyak 22 jiwa di tahun 2019.

Tabel 9
Jumlah TKI Tulungagung yang terdaftar di Tulungagung Tahun 20116-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	455	2.505	2.960
2017	967	2.222	3.189
2018	1.020	2.191	3.211
2019	1.099	2.362	3.461

Sumber data : SISKOTKLN, 2020



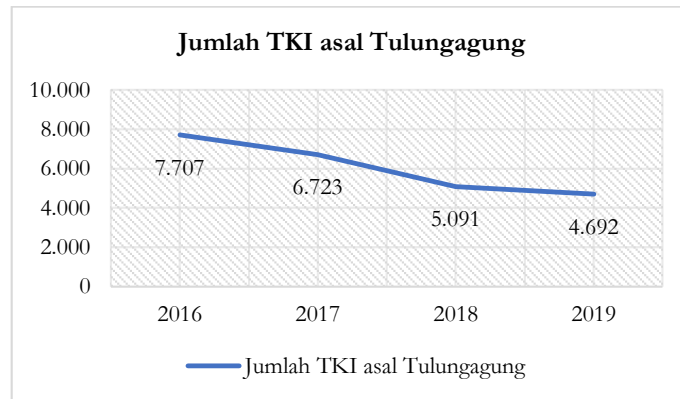
Tabel diatas menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah tenaga kerja Indonesia asal Tulungagung. Tahun 2016 jumlah TKI yang terdaftar berjumlah 2.960 jiwa , 2.505 jiwa adalah tenaga kerja perempuan artinya sekitar 85% tenaga kerja Indonesia yang terdaftar didominasi perempuan. Sementara di tahun 2019 dari 3.461 jiwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang terdaftar, sebanyak 2.362jiwa adalah tenaga kerja perempuan artinya sekitar 68% sedangkan 32% tenaga kerja laki-laki.

Tabel 10
Jumlah TKI asal Tulungagung

Tahun	Jumlah
2016	7.707
2017	6.723

2018	5.091
2019	4.692

Sumber data : BNP2TKI, 2020

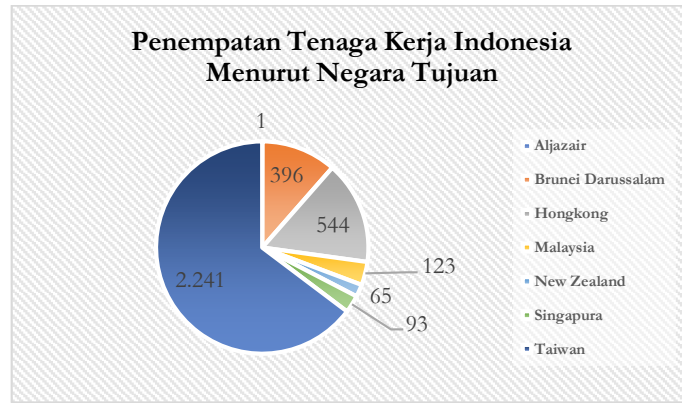


Data diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar di tahun 2016 sebanyak 7.707 orang sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.692 jiwa. Perkembangan jumlah tenaga kerja tahun 2016 dibanding 2019 mengalami penurunan sebesar 40%.

Tabel 11
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Tujuan

No	Negara Tujuan	Jumlah
1	Aljazair	1
2	Brunei Darussalam	396
3	Hongkong	544
4	Malaysia	123
5	New Zealand	65
6	Singapura	93
7	Taiwan	2.241

Sumber : Database Disnakestrans Kab. Tulungagung, 2020

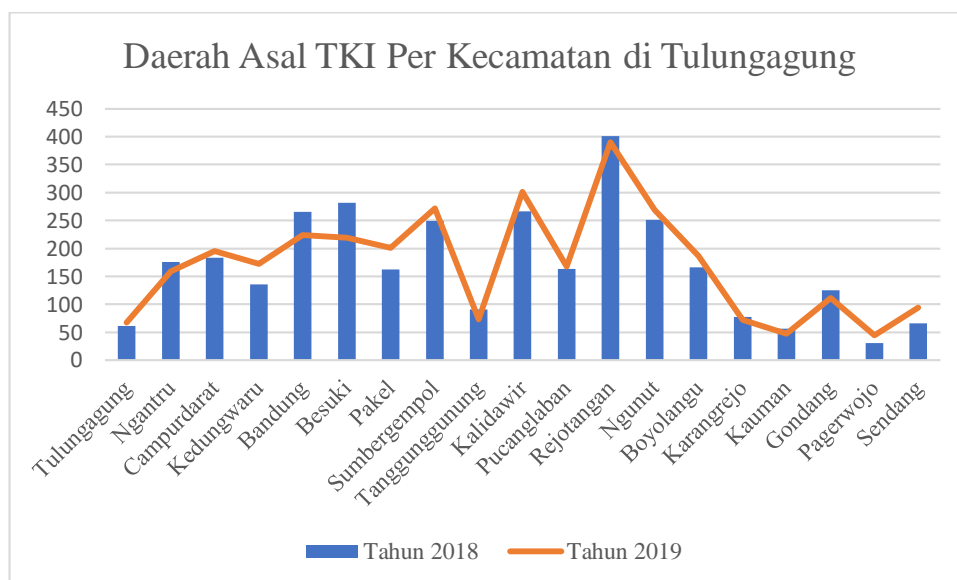


Data diatas menunjukkan bahwa penempatannya tenaga kerja Tulungagung terbanyak berada di Taiwan berjumlah 2.241 jiwa, selanjutnya di Hongkong berjumlah 544 jiwa dan di Brunei Darussalam berjumlah 396 orang.

Tabel 12
Daerah asal TKI per Kecamatan di Kab. Tulungagung Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Jumlah		No	Kecamatan	Jumlah	
		2018	2019			2018	2019
1	Tulungagung	61	67	11	Pucanglaban	163	168
2	Ngantru	176	159	12	Rejotangan	401	390
3	Campurdarat	183	195	13	Ngunut	251	269
4	Kedungwaru	136	172	14	Boyolangu	166	187
5	Bandung	265	224	15	Karangrejo	77	72
6	Besuki	282	219	16	Kauman	56	47
7	Pakel	162	201	17	Gondang	125	111
8	Sumbergempol	249	272	18	Pagerwojo	31	44
9	Tanggunggunung	91	73	19	Sendang	66	94
10	Kalidawir	266	301	Jumlah		3.207	3.265

Sumber : SISKOTKLN, 2020



Data diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia tahun 2018-2019 yang berasal dari Tulungagung.

Tabel 13
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Aljazair

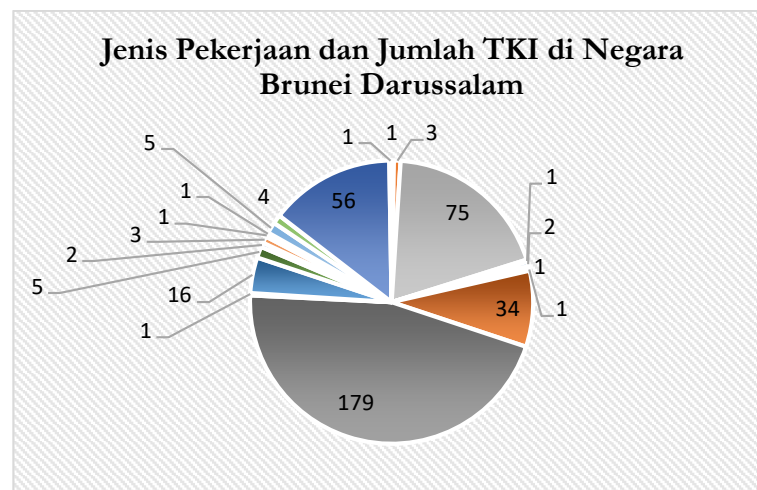
No	Negara	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Aljazair	Contruction Worker	1

Sumber : SISKOTKLN, 2020

Tabel 14
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Brunei Darussalam

No.	Jenis Pekerjaan	N	No.	Jenis Pekerjaan	N
1	Butcher	1	11	Laborer	16
2	Construction Labourers	3	12	Labour	5
3	Construction Worker	75	13	Restaurant Worker	2
4	Domestic Helper	1	14	Tailor, Dressmaker	3
5	Domestic Worker	2	15	Technician	1
6	Fitter	1	16	Waiter	1
7	General Helper	1	17	Waitress	5
8	General Worker	34	18	Work Shop	4
9	General Worker & Skill Worker	179	19	Worker	56
10	Kitchen Helper	1	20	Worker (Woman)	1

Sumber : SISKOTKLN, 2020

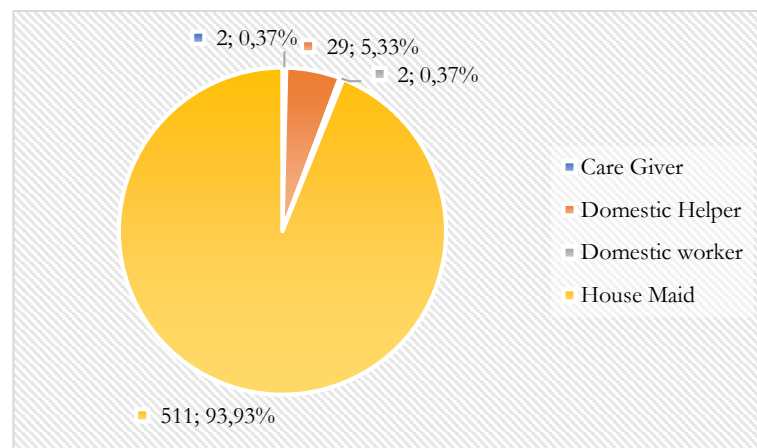


Data diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Brunei Darussalam terbanyak bekerja pada General Worker & Skill Worker dan Contruction Worker. Sedangkan tenaga kerjaa perempuan yang terdaftar hanya 1 (satu) jiwa saja.

Tabel 15
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Hongkong

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Care Giver	2
2	Domestic Helper	29
3	Domestic worker	2
4	House Maid	511

Sumber : SISKOTKLN, 2020



Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong jenis bekerja adalah House Maid. Selanjutnya Domestic Helper dan Domestic Woker dan Care Giver.

Tabel 16
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Malaysia

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Agricultural Labour	1	10	House Maid	3
2	Caregiver	1	11	Housekeepers/PLRT	3
3	Cleaners	2	12	Operator	1
4	Contruction Worker	72	13	Operation Production	1
5	Cooks	3	14	Platation Worker	9
6	Domestic Helper	1	15	Poultry Man	2
7	Domestic Worker	5	16	Production Operator	3
8	Farm Industry	4	17	Worker	6
9	General Worker	6	Total TKI		123

Sumber : SISKOTKLN, 2020

Tabel 17
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara New Zealand

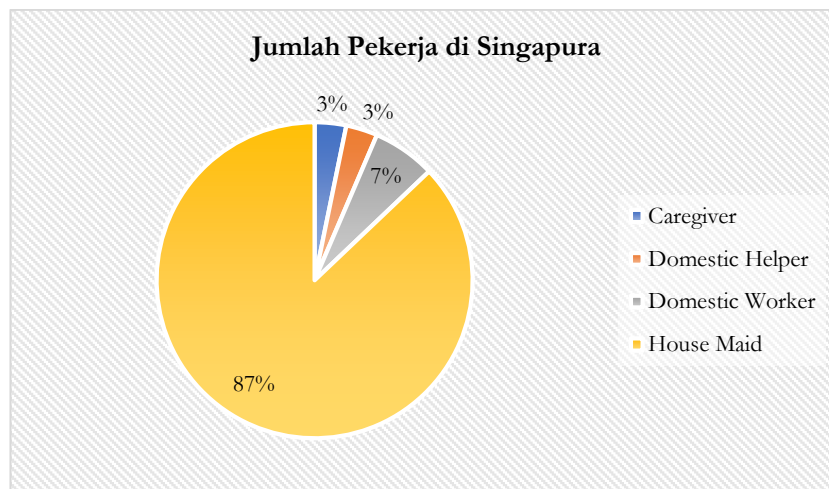
No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Harvester	65

Sumber : SISKOTKLN, 2020

Tabel 18
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Singapura

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Caregiver	3
2	Domestic Helper	3
3	Domestic Worker	6
4	House Maid	81

Sumber : SISKOTKLN, 2020

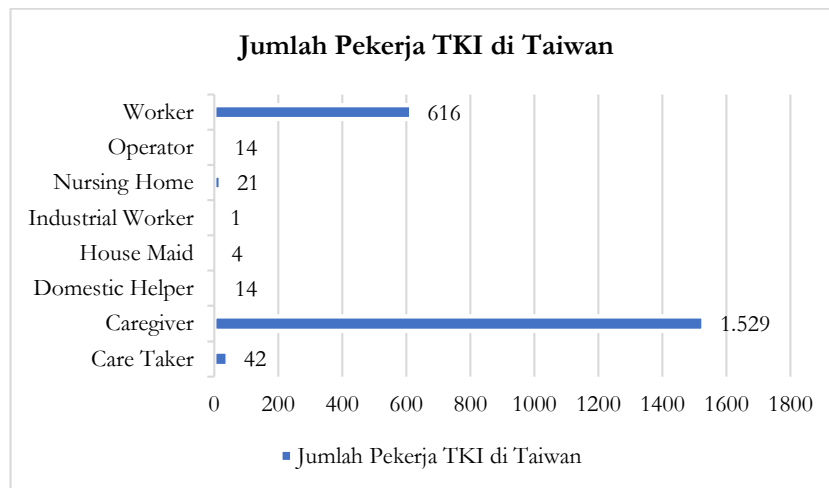


Tabel 19
Jenis Pekerjaan dan Jumlah TKI di Negara Taiwan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Care Taker	42
2	Caregiver	1.529
3	Domestic Helper	14

4	House Maid	4
5	Industrial Worker	1
6	Nursing Home	21
7	Operator	14
8	Worker	616

Sumber : SISKOTKLN, 2020



C. Temuan Penelitian Keterlibatan Tenaga Kerja Wanita dalam Keanggotaan Serikat Pekerja dan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Tabel 20
Temuan Penelitian

No	Nama	Negara Tujuan	Pekerjaan	Bergabung Menjadi Anggota IMWU	Pendapatan			Konsumsi/ Pengeluaran Keluarga			Keadaan Tempat Tinggal			Fasilitas Tempat Tinggal			Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
					T	S	R	T	S	R	T	S	R	T	S	R	T	S	R	
1	Retno Novitasari	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
2	Marlilik	Taiwan	Caregiver	Ya	√				√			√			√			√		
3	Siti Nurul Hidayah	Taiwan	Caregiver	Ya	√				√			√			√			√		
4	Sumarti	Taiwan	Caregiver	Ya	√				√			√			√			√		
5	Siti Nuranisah	Taiwan	Caregiver	Ya	√				√			√			√			√		
6	Tri Riyanti	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
7	Siti Khotimah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
8	Sinta Kasminasri	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
9	Nunung Binti Karomah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
10	Ni Matul Hamidah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
11	Susanti	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
12	Ardila Tofani	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
13	Widya Rini	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
14	Supriati	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
15	Utut Suwarsih Binti Suwanto	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
16	Nurhayati	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
17	Siti Munikah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
18	Eni Winarsih	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
19	Sunarmi	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
20	Yayuk	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		
21	Nusrotul Badriyah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√				√			√			√			√		

22	Jamiah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√			√			√		
23	Mutini	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
24	Istiyansih	Taiwan	Caregiver	Ya	√			√		√				√		
25	Rahayuningsih	Taiwan	Caregiver	Ya	√			√		√				√		
26	Jeni Susana	Taiwan	Caregiver	Ya	√			√		√				√		
27	Sunariyah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
28	Umi Hasanah	Taiwan	Caregiver	Ya	√			√		√				√		
29	Susanti	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
30	Kustiyah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
31	Erna Puji Lestari	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
32	Partini	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
33	Andayani	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
34	Lilik Purwaningsih	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
35	Sumirah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
36	Ana Mubadiah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
37	Ardila Tofani	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
38	Supatmi	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
39	Susalasih	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
40	Umayah	Taiwan	Nursing Home	Tidak	√			√		√				√		
41	Katini	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
42	Arum Tri Palupi	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
43	Ami Yulisetyowati	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
44	Umayah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
45	Hana Kristiani	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
46	Yayuk Widyawati	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
47	Lina Supiyah	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
48	Wiji	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
49	Prapti	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		
50	Jatin	Taiwan	Caregiver	Tidak	√			√		√				√		

51	Khoirul Hanifah	Singapura	House Maid	Ya	√			√		√			√			√	
52	Dwi Swandari	Singapura	Domestic Worker	Ya	√			√		√			√			√	
53	Anis Suprihatin	Singapura	House Maid	Ya	√			√		√			√			√	
54	Diyah Widyaningsih	Singapura	House Maid	Tidak	√			√		√			√			√	
55	Mamik Sri Wahyuni	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√		√			√			√	
56	Siti Lis Handayani	Singapura	House Maid	Tidak	√			√		√			√			√	
57	Wiji Rahayu	Singapura	House Maid	Tidak	√			√		√			√			√	
58	Nisfatul Laili	Singapura	House Maid	Ya	√			√		√			√			√	
59	Nur Alfiyah	Singapura	House Maid	Ya	√			√		√			√			√	
60	Arik Anggraeni	Singapura	House Maid	Ya	√			√		√			√			√	
61	Robiatul Adawiyah	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√				√	√			√			√	
62	Narmiasih	Singapura	House Maid	Ya		√			√	√			√			√	
63	Ririk Napiah	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
64	Ernawati	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
65	Ade Yuliana	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
66	Yuli Pertiwi	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
67	Wiji Utami	Singapura	Domestic Worker	Tidak		√			√	√			√			√	
68	Nur Idayati	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
69	Lina Puspitasari	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
70	Eni Indiati	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
71	Susanti	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
72	Sumarti	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
73	Listiana	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
74	Suyatmi	Singapura	House Maid	Tidak		√			√	√			√			√	
75	Wiwin Diningsih	Singapura	House Maid	Tidak		√				√	√		√			√	
76	Ika Nia Trisnawati	Singapura	House Maid	Tidak		√			√		√		√			√	
77	Ririn Sulistyowati	Singapura	House Maid	Tidak		√			√		√		√			√	
78	Siti Kalimah	Singapura	House Maid	Tidak		√			√		√		√			√	
79	Suprihatin	Singapura	House Maid	Tidak		√			√		√		√			√	

80	Yening	Singapura	House Maid	Tidak	√		√		√		√		√	
81	Siti Aminah	Singapura	Domestic Worker	Ya	√		√		√		√		√	
82	Yuliana Suci Listari	Singapura	House Maid	Ya	√		√		√		√		√	
83	Tri Wahyuni	Singapura	Domestic Worker	Ya	√		√		√		√		√	
84	Mujiati	Singapura	House Maid	Ya	√		√		√		√		√	
85	Asmaningsih	Singapura	House Maid	Ya	√		√		√		√		√	
86	Anik Asmiati	Singapura	House Maid	Ya	√		√		√		√		√	
87	Rina Setiawati	Singapura	House Maid	Ya	√			√	√		√		√	
88	Citrawati	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√	√		√		√	
89	Supartin	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√	√		√		√	
90	Suryati Arjo Suwito	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
91	Muntini	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
92	Siti Nitasari	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
93	Erna Fitri Rahayu	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
94	Nanik Lestari	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
95	Binti Nuryatin	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√	√		√		√	
96	Rusmiati	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
97	Endah Saestuti	Singapura	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
98	Anik Wahyu Utami	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√	√		√		√	
99	Dewi Fatmawati	Singapura	Nurse Assistant	Tidak	√			√	√		√		√	
100	Yuniarti	Singapura	Domestic Worker	Tidak	√			√	√		√		√	
101	Naning Alfiani	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
102	Siti Hasanah	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
103	Sundari	Hongkong	Caregiver	Tidak	√			√	√		√		√	
104	Siti Maesaroh	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
105	Sunarsih	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
106	Haryati	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
107	Sutriani	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	
108	Romelah	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√		√		√	

109	Sulami	Hongkong	House Maid	Tidak	√					√	√			√			√	
110	Siti Mudalifah	Hongkong	House Maid	Tidak	√					√	√			√			√	
111	Muyatin	Hongkong	House Maid	Tidak	√					√	√			√			√	
112	Siti Kholipah	Hongkong	House Maid	Tidak	√					√	√			√			√	
113	Hamiati	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
114	Jumiyati Sujari	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
115	Dwi Krisnawati	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
116	Sriani Bejo Satrio Utomo	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
117	Siti Astutik	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
118	Sulistiyoningsih	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
119	Purwanti	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
120	Santi Veriani	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
121	Wahyu Sri Haryanti	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
122	Nur Wiyati	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
123	Sarofah Poniran	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
124	Ida Marwanti	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
125	Kholiful Asna	Hongkong	House Maid	Ya	√				√		√			√			√	
126	Ana Setyowati	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
127	Siti Kholipah	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
128	Kasanah	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
129	Suparmi	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
130	Teradesi	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
131	Lilik Indrasari	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
132	Astutik Mutoharoh	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
133	Siti Khusnul Kotimah	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
134	Karmi	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
135	Rosmita Suwarni	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
136	Sutiyah	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	
137	Endang Beni Wahyuni	Hongkong	House Maid	Tidak	√				√		√			√			√	

138	Nur Hidayah	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
139	Sri Wiyahah	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
140	Nuryanti Kasno	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
141	Hartutik	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
142	Ida Kristiana	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
143	Situn	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
144	Mariyatun	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
145	Sudarmi	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
146	Yuli Fajaryanti	Hongkong	House Maid	Ya	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
147	Endri Wahyuni	Hongkong	House Maid	Ya	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
148	Nova Yuliana	Hongkong	House Maid	Ya	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
149	Erma Nopitasari	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
150	Siti Purwahyuningsih	Hongkong	House Maid	Tidak	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber : Hasil wawancara data diolah

Keterangan tabel :

T = Tinggi

S = Sedang

R = Rendah

Hasil wawancara dan pengolahan data menunjukkan bahwa :

1. Keikutsertaan tenaga kerja migran wanita asal Tulungagung bergabung menjadi anggota serikat pekerja sebagai berikut:
 - a. Tenaga kerja migran wanita di Taiwan, sebanyak 8 orang dari 50 orang atau 16% bergabung menjadi anggota serikat pekerja dan 84% tidak.
 - b. Tenaga kerja migran wanita di Singapura, sebanyak 14 orang dari 50 orang atau 28% bergabung menjadi anggota serikat pekerja dan 72% tidak.
 - c. Tenaga kerja migran wanita di Hongkong, sebanyak 11 orang dari 50 orang atau 22% bergabung menjadi anggota serikat pekerja dan 78% tidak.
2. Kesejahteraan tenaga kerja migran di Taiwan pada indikator:
 - a. Jumlah Gaji
 - 1) Pendapatan tenaga kerja migran wanita di Taiwan memiliki pendapatan dalam kategori tinggi yaitu diatas Rp. 10.000.000,-
 - 2) Pendapatan tenaga kerja migran wanita di Singapura sebanyak 22% (11 orang dari 50 orang) yang memiliki pendapatan dalam kategori tinggi dan selebihnya memiliki pendapatan dalam kategori sedang.
 - 3) Pendapatan tenaga kerja migran wanita di Hongkong memiliki pendapatan sama dengan pada negara Taiwan
 - b. Jumlah pengeluaran

Konsumsi keluarga pekerja migran wanita di Taiwan, Singapura dan Hongkong secara umum pada kategori sedang yaitu:

$$\text{Rp. } 1.000.000 \leq \text{konsumsi} \leq \text{Rp. } 5.000.000,-$$

Tenaga kerja migran berusaha untuk menekan konsumsi dan mampu menyisihkan pendapatan yang diperoleh untuk ditabung. Konsumsi dapat ditekan, hal ini dikarenakan kebutuhan makan yang menjadi kebutuhan utama sudah ditanggung oleh majikan tempat bekerja.
 - c. Keadaan tempat tinggal
 - 1) Keadaan tempat tinggal tenaga migran wanita di Taiwan secara umum sangat layak. Jenis pekerjaan sebagai Caregiver yang menuntut majikan menyediakan tempat tinggal.

Pekerja sama dengan majikannya.

- 2) Keadaan tempat tinggal tenaga migran wanita di Singapura secara umum sangat layak. Jenis pekerjaan sebagai House Maid menuntut pekerja serumah dengan majikan,
 - 3) Keadaan tempat tinggal tenaga migran wanita di Hongkong secara umum juga sangat layak. Pekerjaan sebagai House Maid menuntut pekerja bekerja penuh waktu di rumah majikan maka keadaan rumah sama dengan pekerjanya.
- d. Fasilitas tempat tinggal tenaga migran wanita di Taiwan, Singapura dan Hongkong sesuai dengan jenis pekerjaan menuntut penuh waktu di rumah majikan maka fasilitas pekerja sama dengan fasilitas majikan.
 - e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan tenaga kerja wanita di Taiwan, Singapura dan Hongkong sangat mudah dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan pekerja.
3. Secara umum tenaga kerja wanita di negara Taiwan tidak semuanya bergabung pada serikat pekerja. Para pekerja meyakini bahwa pekerja migran wanita di luar negeri yang sudah mengurus prosedur resmi, maka Pemerintah memiliki intervensi dan membantu penyelesaian jika terjadi masalah pada tenaga kerja walaupun di negeri orang.²⁵
 4. Pekerja wanita di Hongkong tidak semua bergabung pada serikat pekerja meyakini bahwa para juragan yang ada di Hongkong akan memenuhi semua hak para pekerja karena pekerja migran wanita telah melakukan prosedur secara resmi melalui penyalur tenaga kerja yang terpercaya.²⁶
 5. Pekerja migran wanita di Singapura tidak semua bergabung dengan serikat pekerja dengan alasan karena adanya kesamaan bahasa dengan migran Indonesia maka mereka lebih mudah melakukan komunikasi dengan bos mereka.²⁷
 6. Migran Hongkong, Singapura dan Taiwan mereka tidak bergabung karena mereka bekerja di negara tujuan bukan kali pertama menjadi buruh migran tetapi mereka melanjutkan kontrak yang sama dengan tujuan kerja yang sama.
 7. Tidak banyak bergabung dengan serikat pekerja karena adanya iuran bulanan yang harus ditanggung para anggota

²⁵Wawancara dengan Tri Riyanti migran Tulungagung yang pernah di bekerja di Taiwan.

²⁶Wawancara dengan Suparmi migran Tulungagung yang pernah bekerja di Hongkong.

²⁷Wawancara dengan Mujiati migrant Tulungagung yang pernah bekerja di Singapura.

BAGIAN IV

Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita Tulungagung Di Taiwan, Singapura Dan Hongkong

A. Kiprah Indonesian Migrant Worker Union di Hongkong, Taiwan, dan Singapura

Serikat pekerja didirikan sebagai bentuk perlindungan serta peningkatan kesejahteraan TKI yang berada di luar negeri. Di Indonesia perlindungan terhadap pekerja di luar negeri merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah. Sedangkan mendapatkan pembelaan, serta dukungan terhadap segala kondisi pekerja di luar negeri merupakan hak mereka. Para TKI juga merupakan warga negara Indonesia, maka berhak atas segala pelayanan tanpa pengecualian apapun. Mereka juga berhak dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas diri. Posisi martabat manusia juga harus diperhatikan, dengan menghindari praktik gelap dari sebuah penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

Perwujudan dalam rangka kegiatan untuk penyetaraan dalam hal-hal yang harusnya diperoleh tenaga kerja imigran Indonesia ialah penempatan yang setara terhadap pekerja dengan pendapatan yang diterima cukup layak, serta menjunjung tinggi HAM setiap masyarakat. Keseluruhan mekanisme akan perlindungan pekerja migran Indonesia wajib dibenahi oleh negara, yang mana mencerminkan nilai dari peri kemanusiaan serta kualitas suatu bangsa mulai dari awal; pra-bekerja hingga paska-bekerja di luar negeri. Perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah untuk penyaluran dan upaya untuk melindungi TKW, ini baik di pusat maupun pada daerah-daerah.

1. Kiprah Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) di Hongkong

Organisasi memiliki salah satu peran yang penting dalam melindungi anggotanya, hal ini yang melandasi diadakannya suatu organisasi buruh migran sebagai tempat perlindungan selama mereka meniti karir dan bekerja di tanah orang. Langkah ini sesuai dengan *International Labour Organization (ILO)* yang dibentuk tahun 1987 untuk memberikan hak berorganisasi dan berserikat sesuai kehendak masing-masing individu. Pekerja tersebut dapat mengikuti serikat-serikat yang ada di negara tempat mereka bekerja.

Organisasi perlindungan hak buruh Indonesia cukup berkembang di Hongkong dibandingkan negara lain yang memiliki organisasi serupa. Hal ini dikarenakan Hongkong mendukung adanya nilai-nilai dalam persamaan hak, dan tidak terdapat pembeda antar ras, golongan, maupun latar belakang lainnya. Pemerintah Hongkong juga mendukung kebebasan akan berorganisasi, sehingga organisasi buruh di negara ini memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan keinginannya. Terdapat beberapa organisasi serta asosiasi yang didirikan oleh pekerja disana diantaranya adalah IMWU atau *Indonesian Migrant Worker Union* (IMWU), Asosiasi Tenaga kerja Indonesia, Koalisi Tenaga Kerja Indonesia Hongkong (KOTHIKO), serta beberapa organisasi sejenis lainnya.

Perjalanan akan terbentuknya Organisasi Buruh Migran Indonesia di Hongkong sendiri cukup panjang. Pada awalnya terdapat IMWU yang dulu bernama Indonesian Group-Hongkong (IG-HK) pada tahun 1993, dimana aktivitas yang dilakukan organisasi ini ialah melakukan pembelaan pada buruh atas pelanggaran hak-haknya yang dilakukan oleh majikan maupun agen penyalur. Beberapa tahun kemudian kinerja organisasi menunjukkan hal yang positif dengan berkembangnya jumlah anggota yang bergabung dengan organisasi ini.

Pada 1999, terdapat keputusan perubahan nama dari organisasi yang sedianya bernama IG-HK menjadi *Indonesian Migrant Worker Union*, yang menjadi nama resmi serikat buruh yang pertama terdaftar di pemerintah Hongkong pada waktu itu. Yang mana pada saat itu anggota *Indonesian Migrant Worker Union* TKI asal Indonesia yang bekerja di Hongkong.

Jumlah anggota IMWU pada tahun 2004 mencapai 2000 orang. Dalam perjalanannya, organisasi ini sering memimpin perjuangan pekerja migran Indonesia di hongkong. Perlindungan yang dilakukan untuk menyelamatkan hak-hak pekerja lain. Adanya kemenangan yang didapat akan menjadi modal untuk meneruskan perjuangan serikat lain. Beberapa organisasi buruh juga bergerak di berbagai bidang seni budaya, olahraga, keagamaan dan lain sebagainya.

Serikat ini pada tahun 2000 oleh 7 koalisi buruh migran Indonesia, tepatnya di bulan Agustus. Prinsip yang menjadi landasan adalah kebersamaan, solidaritas dan perasaan senasib. pada awalnya, koalisi ini beranggotakan 7 organisasi BMI hingga ditahun 2008 berkembang dan menjadi 9 organisasi BMi yang bergabung. Tujuan diakan koalisi ini ialah sebagai wadah untuk mempersatukan beberapa organisasi pekerja dari Indonesia yang berada di luar negeri dan sebagai upaya aksi sosial

dengan mendirikan pusdiklat untuk tenaga kerja Indonesia dan layanan advokasi dan rumah singgah bagi tenaga kerja yang memiliki permasalahan dengan majikan atau agen. Dimana ini merupakan salah satu tugas penting koalisi ini didirikan yaitu sebagai bentuk kerjasama dalam meningkatkan komunikasi dengan organisasi dalam wilayah negara Hong-Kong.

Dalam melaksanakan kegiatannya, anggota KOTHIKO ini juga terdiri dari beberapa organisasi dari melakukan kegiatan secara bersama-sama serta saling mensupport satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika hendak melakukan kegiatan turun jalan melakukam aksi bersama. Selain kegiatan turun ke jalan, terdapat berbagai kegiatan yang diakan seperti *training* maupun seminar yang mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja secara percuma maupun berbayar.

Kesempatan yang didapatkan ketika berorganisasi di Hongkong tidak hanya membangun relasi antar organisasi yang sama asal Indonesia saja, melainkan juga membuka kesempatan dalam membangun relasi dengan organisasi serupa yang berasal dari negara di Asia lainya. Dalam beberapa kesempatan, aliasni pekerja migran Indonesia untuk hongkong ikut terlibat dalam pertemuan dengan pemerintah Hongkong serta perwakilan Indonesia yang beraa di sana meskipun sering berbeda pendapat.²⁸

Kasus yang dialami oleh Erwiana Sulistyaningsih, yang berhasil menang melalui tuntutan ganti rugi terhadap berbagai penganiayaan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa kiprah serikat pekerja yang ada di Hongkong memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perlindungan tenaga kerja migrant berasal dari Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan dari IMWU antara lain:

- a. Melakukan koordinasi antar pekerja Indonesia pada sebuah serikat

Organisasi antar pekerja Indonesia ini selalu aktif dalam melakukan pertemuan dengan para buruh migran terutama yang belum bergabung dengan serikat pekerja. Hal itu dilakukan dengan mendata seluruh pekerja migran wanitadan mendatangi komunitas- komunitas yang ada.

- b. Meningkatkan kapasitas serikat buruh migran dan anggotanya;

Dalam rangka meningkatkan kapasitas buruh migran dan anggotanya maka kiprah serikat pekerja antara lain:

²⁸ Narsidah dan Fika Murdiana R., "Selayang Pandang Organisasi BMI di Hong Kong," *Pusat Sumber Daya Buruh Migran (Migrant Worker Resource Centre)*, last modified Januari 13, 2012, diakses September 22, 2017, <https://buruhmigran.or.id/2012/01/13/selayang-pandang-organisasi-bmi-di-hong-kong/>.

- Kursus bahasa sesuai dengan tempat tujuan bagi para buruh migran.
- Training Kerja
- Training dan advokasi hak pekerja di negara tujuan buruh migran.
- Advokasi terhadap kedutaan Besar Republik Indonesia.

Penilaian dari Serikat Pekerja bahwasanya perlindungan terhadap hak buruh diabaikan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada pemantauan kebijakan serta pengalaman dalam menangani kasus yang dialami oleh Solidaritas Perempuan. Hal ini terlihat, dimana tidak ada upaya tanggung jawab yang dilakukan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Kurangnya upaya untuk melindungi para tenaga kerja perempuan sebagai bentuk pemikiran pemerintah dengan kecenderungan bahwa buruh migran Indonesia berupa suatu komoditas serta pengelolaan yang kurang baik, hanya sebatas untuk ditempatkan.

Pembangunan sistem serta penanganan buruh migran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum menggunakan kerangka HAM. Hal ini di buktikan dimana belum dilakukannya proses ratifikasi kesepakatan (konvensi) Migran di tahun 1990 dimana yang memuat kesepakatan untuk melindungi tenaga kerja serta keluarganya dalam segala mekanisme imigrasi yang mudah, pra-migrasi hingga pasca-migrasi. Konvensi ini memuat perlindungan buruh dari kondisi kehidupan, kondisi pekerja yang tidak manusiawi, sasaran penyiksaan, rasisme, *sexual harassment*, perbudakan dan lain-lain. Dalam konvensi juga melindungi hak tenaga kerja di luar negeri untuk bebas berkarya, mengemukakan pendapat, berserikat, menjalankan perintah agama, kehidupan yang layak seperti halnya penduduk negara tempat kerja seperti ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan sosial.

Konvensi ini juga memuat akan terjaminnya buruh migran akan akses informasi hak-hak mereka seperti; persamaan hukum, layanan advokasi hukum serta tindakan hukum yang kurang maksimal, serta beberapa hak pekerja lain seperti pengiriman uang, pulang ke Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan dalam konvensi ini, negara tidak mampu mengelola mekanisme perlindungan buruh migran Indonesia serta kewajiban hukum dalam memenuhi hak-hak buruh migran seperti yang terdapat pada kesepakatan yang dibuat. Melalui kebijakan mengenai pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, pokok-pokoknya mengatur kegiatan ketataniagaan dibanding upaya perlindungan, dari

109 pasal yang tercantum dalam undang undang tersebut hanya terdapat 8 pasal yang mengatur perlindungan.

Penilaian kinerja negara dalam menangani TKI sebagai wujud tanggungjawab pemerintah tidak dilakukan secara maksimal dan efisien. Tanggapan yang dijalankan pemerintah sebagai bentuk reaksi semata dengan ketiadaan penyelidikan yang lebih mendalam kepada permasalahan yang terjadi seperti kebijakan untuk melindungi pekerja serta HAM yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari pekerja merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan serta mengakses hak-hak yang dilanggar yang mana merupakan milik mereka. Terdapat pula kejadian yang dialami oleh buruh migran seperti revictimisasi, dipersalahkan ketika mereka hendak mencoba untuk mengadakan atau berkoordinasi dengan aparat pemerintah untuk mencari jalan keluar serta penanganan permasalahan akan terjadi.

Dalam aspek budaya hukum, ketidakadilan gender yang rentan dialami oleh buruh migran perempuan pada mekanisme penempatan buruh migran Indonesia yang belum meratifikasi konvensi buruh migran 1990 yang mengacu pada kerangka HAM. Pemahaman atas situasi ini, bahawasanya buruh migran dianggap sebagai suatu komoditas yang dilihat sebagai salah satu pemasukan devisa suatu negara, namun tidak melihat bahwa buruh migran perempuan yang notabene manusia sebagai pekerja, warga negara, dan perempuan yang melekat hak-haknya pada dirinya.

Perspektif buruh migran sebagai suatu komoditas bisnis memiliki terhadap keterlambatan hak dari pekerja untuk dipenuhi. Belum melihatnya para pekerja perempuan sebagai seorang pekerja serta manusia yang harus dipenuhi haknya menjadikan terhambatnya perlindungan terhadap buruh, disisi lain pandangan itu juga berimbas pada rentannya buruh migran perempuan sebagai korban akan eksploitasi selama proses migrasi berlangsung. Selain itu, pemerintah serta wakil rakyat masih banyak yang berpikir bahwa buruh migran yang menyebabkan penurunan harga diri bangsa, yang seharusnya sebagai pihak yang melindungi hak warga negaranya.

Tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut untuk berupaya dalam pembangunan gerakan feminis berbasis pada buruh migran perempuan beserta keluarga untuk bersama melawan ketidakadilan dan kemiskinan akibat dari politik negara maupun yang non negara, agar teraksesnya akan kontrol hidup mereka.

Melalui adanya kesadaran akan permasalahan ini, diharapkan mampu menghadapi kerentanan mekanisme imigrasi yang buruk, perdagangan manusia, HIV-AIDS dan lain sebagainya. Disamping itu, untuk membentuk persatuan antar serikat pekerja dan anggota keluarga agar mampu mendesak pemerintah untuk mendapatkan jaminan akan payung hukum atas perlindungan hak-hak mereka dengan mengadopsi kesepakatan migran tahun 1990. Dan juga mampu mendorong pemerintah dalam mengubah mekanisme penempatan dan perlindungan buruh migran perempuan agar tidak terdapat kerentanan di dalamnya. Serta kegiatan ini juga mengkampanyekan agar bersama-sama untuk melindungi buruh migran perempuan dari tindakan-tindakan yang menyebabkan kerentanan seperti *human trafficking*, HIV, AIDS.

Dalam mencaai tujuan tersebut, serikat pekerja juga merancang program sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas, pengelolaan, pelaksanaan perlindungan hukum, dan kebijakan perlindungan lain. Hal ini ditujukan agar buruh kerja migran perempuan mampu mendesak adanya perubahan dalam peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja perempuan untuk memperjuangkan yang menjadi haknya. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya desakan untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 dan merevisi kebijakan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja Migran agar mendorong adanya perlindungan atas pekerja yang rentan akan tindakan kurang menyenangkan khususnya para Pekerja Rumah Tangga;
- 2) Mengawasi penerapan atas penghapusan ketimpangan perempuan yang merupakan hasil dari CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*);
- 3) Mengawasi penerapan kerjasama terkait Buruh Migran
- 4) Pengawasan atas penerapan peraturan perundang-undangan Undang-Undang yang mengatur tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
- 5) Kegiatan kepedulian terhadap penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS

c. Menghentikan *underpayment* dan biaya agen yang mahal;

Legalitas tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga harus memperhatikan hak-hak para tenaga kerja. Termasuk didalamnya jaminan perlindungan, serta pencapaian rasa aman dan nyaman saat bekerja di negara orang.²⁹

Upaya beberapa organisasi serikat buruh juga harus selalu memantau perjanjian kerja masing-masing tenaga migran dan melakukan pengawasan terhadap agen penyalur buruh yang digunakan para tenaga kerja migran yang tergabung pada serikat pekerja. Serikat pekerja juga melakukan komunikasi kepada agen tenaga kerja yang menunjukkan kesepakatan menguntungkan pekerja migran wanita dan agen.³⁰

d. Melakukan perlindungan melalui pembentukan undang-undang bagi tenaga kerja Indonesia

Banyak kebijakan pemerintah yang belum rampung dalam perlindungan tenaga kerja setelah salah satu diantaranya selesai disahkan. Kebijakan yang dibuat untuk melindungi buruh migran yang termuat dalam suatu Undang-Undang serta pelaksanaannya. Organisasi pekerja juga pernah melakukan pengajuan pendapat agar Undang-Undang No. 39 tahun 2004 untuk dilakukan revisi dalam memenuhi perlindungan buruh migran yang berada di luar negeri.³¹

e. Membela hak-hak buruh migran

Penilaian dari Serikat Pekerja bahwasanya sangat diabaikan oleh negara, padahal hal ini menyangkut perlindungan tenaga Indonesia. Berlandaskan pada pemantauan kebijakan serta pengalaman dalam menangani kasus yang dialami oleh Solidaritas Perempuan. Hal ini terlihat, dengan kurang maksimalnya langkah yang dilakukan negara dalam melindungi TKW dalam hal ini peraturan terkait perlindungan tenaga kerja atau buruh migran Indonesia. Hal tersebut terjadi karena orientasi penyaluran tenaga kerja ke luar negeri hanya berfokus pada

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No. 18 Tahun 2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta, Indonesia, 2017), a. 14.

³⁰ Wawancara dengan mbak Idah purna tenaga kerja Hongkong, 18 Agustus 2018.

³¹ Humas BP2MI, "Ramiany Sinaga: Komitmen Negara Untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," last modified Desember 13, 2017, diakses Desember 17, 2017, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/ramiany-sinaga%3A-komitmen-negara-untuk-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

penempatan, bukan memperhatikan aspek perlindungan pekerja.³² Berbagai peraturan perundang-undangan juga telah jelas membahas hak-hak buruh migran. Sehingga seorang tenaga kerja Indonesia juga perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Pada pertemuan antar buruh migran pada tahun 1990, tenaga kerja yang berada di luar negeri memiliki hak perlindungan atas segala macam tindakan yang merugikan mereka. Dapat dilihat bahwa telah banyak kasus tindakan kekerasan, tindakan kejam lain yang tidak manusiawi, sampai pelecehan seksual yang kerap terjadi pada TKW. Melalui forum buruh migran, diharapkan setiap tenaga kerja Indonesia memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk menjalankan agama mereka, serta berkarya sesuai dengan minat mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya perlindungan untuk buruh migran serta keluarganya sebagai bagian warga negara yang memiliki hak perlindungan. Berkaitan dengan keluarga buruh migran, mereka memiliki hak sebagai bagian dari buruh migran tersebut. Beberapa hak tersebut antara lain:³³

- Mengetahui kondisi keluarganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri
- Memperoleh harta yang dihasilkan keluarganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri
- Mendapatkan dokumen perjanjian keluarganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri
- Memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri

f. Menciptakan aliansi organisasi tenaga kerja luar negeri baik dalam skala lokal sampai internasional

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa organisasi buruh ini merupakan forum untuk menjamin perlindungan hak-hak buruh. Organisasi ini juga ikut memperjuangkan keadilan bagi sesama buruh terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi persatuan buruh migran ini berupaya mewujudkan kebebasan untuk setiap buruh ketika bekerja di luar negeri, untuk mendapatkan hak nya. Organisasi buruh atau serikat pekerja *Indonesia Migrant Worker Union*

³² Pernyataan Eni Lestari, aktivis perempuan di Hongkong yang berasal dari Kediri Jawa Timur, pada acara KTT PBB ke-71 pada tanggal 19 September 2016.

³³ UU No. 18 Tahun 2017 pasal 6 ayat 3

(IMWU) merupakan organisasi buruh yang berkembang lokal pada satu negara di Hongkong dan memiliki jaringan Internasional di beberapa negara di dunia.

2. *Kiprah Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) di Taiwan*

Selain di Hongkong, Organisasi yang terkait dengan buruh migran Indonesia juga terdapat di Taiwan. Organisasi buruh migran yang berkembang di Taiwan atau yang dikenal sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia. Organisasi ini terus berupaya untuk memberikan pertolongan kepada pekerja migran di negara yang ditempatinya. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi wadah atau sarana pengaduan apabila terjadi permasalahan pada buruh migran seperti *overcharging*, PHK sepihak. Selain sebagai wadah aspirasi buruh migran, organisasi ini juga bertindak sebagai perantara informasi mengenai kebijakan migrasi ketenagakerjaan oleh pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih kekurangan aspirasi serta partisipasi pekerja migran yang mana seharusnya dalam pembuatan dan penyusunan kebijakan ini melibatkan tukar pendapat dengan pekerja migran secara langsung maupun tidak langsung. Posisi ini yang melandasi terbentuknya organisasi buruh migran di Taiwan atau yang dikenal sebagai s Serikat Buruh Migran Indonesia, dimana sebagai perantara untuk mengetahui segala kondisi peraturan terkait tenaga kerja di luar negeri.

Beberapa masalah yang dihadapi buruh migran di Taiwan, hingga melandasi pemerintah mendirikan DPLN SBMI Taiwan untuk membantu serta menghimpun kekuatan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia di Taiwan dari para pihak penindas. Selain itu, DPLN SBMI Taiwan melakukan kerjasama antar forum buruh migran Indonesia yang lain untuk mengatasi kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang berkenaan dengan PJTKI yang merugikan pekerja migran.³⁴

Kiprah IMWU di Taiwan antara lain:

- a. Mengkoordinasi buruh migran dalam forum serikat buruh
- b. Menciptakan serikat buruh dan mencari anggotanya
- c. Membantu permasalahan kurang bayar dan biaya yang mahal dalam penyaluran
- d. Mengusulkan pembuatan undang-undang untuk jaminan keadilan buruh
- e. Melindungi hak-hak buruh migran

³⁴ Yully Agyl, "Sejumlah BMI di Taiwan, Sepakat Bentuk DPLN SBMI Taiwan," *Team Liputan BMI*, last modified Januari 10, 2018, diakses Februari 21, 2018, <https://www.liputanbmi.com/baca/2505/sejumlah-bmi-di-taiwan-sepakat-bentuk-dpln-sbmi-taiwan>.

f. Mengembangkan serikat buruh ke taraf yang lebih luas

Gaji dari para pekerja migran Indonesia di Taiwan banyak yang terpotong akibat membayar perusahaan penyalur tenaga kerja. Pengerah tenaga kerja banyak memotong gaji buruh migran. Bahkan potongan bisa mencapai US \$ 3.000 yang artinya pekerja migran wanita membayar setengah tahun gaji mereka untuk membayar perusahaan pengerah tenaga kerja. Data yang dikeluarkan pemerintah Taiwan menyebutkan bahwasanya ada kurang lebih 33.000 pekerja untuk berhenti bekerja dan memutuskan bekerja secara ilegal untuk penghindaran kewajiban untuk membayar perusahaan penyalur tenaga kerja.³⁵

Peran serikat pekerja di Taiwan dalam menyelesaikan permasalahan pekerja migran, antara lain:

- a. Referendum yang terdiri atas tiga tuntutan yang dilakukan oleh organisasi serikat pekerja di Taiwan dengan Mengkoordinasikan 10.000 suara yang berlangsung pada 17 September hingga 10 Desember 2017 dengan tuntutan:
 - 1) Perlindungan atas ekerja sektor rumah tangga berdasarkan UU perburuhan di Taiwan.
 - 2) Pekerja Migran wanita diberi kebebasan untuk mengganti Majikan
 - 3) Penghapusan sistem agen swasta oleh Pemerintah.
 - b. Mengkoordinasikan dengan pemerintah Taiwan untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasi buruh migran dalam proses pembuatan kebijakan maupun peraturan di negara tersebut yang berkenaan dengan aktivitas pekerjaan atau kegiatan mereka di Taiwan;
 - c. Tuntutan serikat pekerja migran wanita pada pemerintah atas pemisahan bangunan tempat tinggal dengan lokasi pabrik dengan alasan keselamatan pekerja;
 - d. Masjid dan Shelter pekerja migran wanita RI dibangun di Taiwan.
3. *Kiprah Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) di Singapura*

Beberapa permasalahan yang terjadi pada buruh migran Indonesia di Singapura, seperti isu perbudakan, transparansi dalam perekrutan, serta penganiayaan merupakan tiga dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam perburuhan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi buruh migran Indonesia dengan menerapkan kebijakan uang jaminan bagi pelaksanaan penggunaan pekerja migran Indonesia di Singapura.

³⁵ "Taiwan Upayakan Upah yang Adil untuk Pekerja Migran," *BBC News Indonesia (Online)*, Desember 10, 2010, diakses Februari 21, 2019, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/12/101215_taiwanmigrantworkers.

Hal ini mengingat pekerja migran yang bekerja di Singapura tidaklah sedikit, dimana hingga April 2018 terdapat 106.825 orang yang merupakan warga Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai Buruh/Pekerja Migran pada sektor rumah tangga, 29,515 orang sebagai ABK, serta 19.547 orang bekerja pada sektor-sektor formal, yang mana sebagian besar pekerja ini berasal dari 3 provinsi di Kepulauan Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.³⁶

Pemerintah Indonesia melalui menteri ketenagakerjaan menyampaikan bahwasanya kebijakan uang jaminan bagi pengguna tenaga kerja Indonesia sebagai langkah dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di Singapura.³⁷ Melalui peraturan yang ditetapkan untuk membuat pengguna tenaga kerja mematuhi peraturan yang ada. Selain itu ketentuan akan upah minimum yang harus diterima oleh pekerja, jam kerja, ketentuan akan hari libur, serta yang lainnya.

Selain kebijakan akan Uang Jaminan, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Singapura juga melakukan perlindungan buruh migran, dimana Mou ini memiliki tindak lanjut dari kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia dalam peranannya menanggapi kasus Pekerja Migran Indonesia sudah sangat baik.³⁸

Kiprah IMWU di Singapura hampir sama dengan di negara Hongkong dan Taiwan, antara lain:

1. Mengkoordinasi buruh migran dalam forum serikat buruh
2. Menciptakan serikat buruh dan mencari anggotanya
3. Membantu permasalahan kurang bayar dan biaya yang mahal dalam penyaluran
4. Mengusulkan pembuatan undang-undang untuk jaminan keadilan buruh
5. Melindungi hak-hak buruh migran
6. Mengembangkan serikat buruh ke taraf yang lebih luas

³⁶ Billy Ponggohong, Burhan Niode, dan Trilke E. Tulung, "Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura," *Jurnal POLITICO - Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 4 (Oktober 2018), diakses November 20, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30526>.

³⁷ Ungkap Bapak Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si, Menteri Ketenagakerjaan

³⁸ Biro Humas Kemnaker, *Siaran Pers KEMNAKER: Menaker Hanif Dukung Penerapan Kebijakan Uang Jaminan bagi Pengguna PMI di Singapura* (Jakarta, 2018).

B. Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan, Singapura dan Hongkong

1. *Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan*

Kesejahteraan dengan indikator pendapatan, dari 50 informan menyatakan bahwa pendapatan dikategorikan tinggi karena penghasilan yang diperoleh diatas Rp.10.000.000,- per bulan. Pendapatan yang diperoleh tersebut dapat bertambah dengan gaji diluar jam kerja. Gaji yang diperoleh TKI yang berada di Taiwan merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara di Asia lainnya.³⁹

Konsumsi/ Pengeluaran keluarga pekerja migran wanitadi Taiwan memang tergantung pada masing-masing individu. Secara umum pekerja migran wanitadengan pendapatan yang tinggi tetap mempertimbangkan motivasi menjadi tenaga migran adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktu libur yang diberikan oleh majikan bagi tenaga kerja migran di Taiwan tidak selalu diimfaatkan untuk berlibur. Banyak yang memanfaatkan waktu untuk lembur atau overtime jika ada kesempatan.⁴⁰ Secara umum pengeluaran pekerja migran wanita di Taiwan dalam ketegori rendah karena mereka juga memenuhi kebutuhan lainnya, seperti keluarga yang ditinggalkan dirumah.

Keadaan tempat tinggal pekerja migran wanita di Taiwan pada kategori sangat layak karena pekerja rumah tangga tinggal bersama majikan dengan fasilitas tidak jauh berbeda dengan majikan. Para pekerja di perusahaan manufakture mendapatakan fasilitas mes atau rumah tinggal yang tidak jauh dari pabrik tempat mereka bekerja, bahkan pada lokasi yang sama dengan pabrik tempat bekerja.

Fasilitas tempat tinggal pekerja migran wanita di Taiwan dalam kategori layak, karena fasilitas yang dimiliki sama dengan fasilitas majikan. Bagi pekerja pabrik mes atau rumah tinggal yang disediakan pabrik sudah dianggap layak bagi para pekerja migran, mengingat sewa rumah di Taiwan relatif mahal.

2. *Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita di Singapura*

Kesejahteraan tenaga migran menunjukkan dari 50 informan sebanyak 11 orang (22%) menyatakan memiliki pendapatan diatas Rp. 10.000.000,- sedangkan sebanyak 39 orang (88%) memiliki penghasila sekitar Rp.5.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- per bulan. Pekerja migran yang mendapatkan gaji diatas Rp. 10.000.000,- adalah pekerja migran yang melanjutkan kontrak dengan majikan yang

³⁹ Haning Romdiati, "Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi, Serta Remitansi," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 7, no. 2 (2012): 27–53, <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/25>.

⁴⁰ Wawancara dengan Umayah salah satu pekerja migran wanita di Taiwan tanggal 7 Juli 2018.

sama. TKI yang bekerja di Singapura sebagian besar bekerja sebagai asisten rumah tangga. pekerja migran tersebut juga telah memiliki status asisten rumah tangga yang terdaftar di KBRI sejumlah 98.256 orang. 20.000 orang yang merupakan warga Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai Buruh/Pekerja Migran pada sektor rumah tangga yang tidak terdaftar di KBRI, 29,515 orang sebagai ABK, serta 19.547 orang bekerja pada sektor-sektor formal.⁴¹ Pendapatan yang diterima buruh migran berbeda tergantung majikan. Gaji berkisar SGH 660 per bulan sampai SGD 800 per bulan. Gaji tersebut ada yang ditambah biaya asuransi dan ada juga yang tidak ditambah biaya asuransi.

Konsumsi/ pengeluaran keluarga pekerja migran di Singapura tergantung individu masing-masing. Kebanyakan pekerja migran wanita di Singapura pada hari libur berkumpul di mal Lucky Plaza Orchard Road, Singapura. Bersama dengan tenaga kerja migran lainnya termasuk dari Filipina. Berbagi cerita dengan sesama tenaga migran wanita dari berbagai daerah di Indonesia menjadi cara yang ampuh untuk menghilangkan penat setelah seminggu melakukan aktivitas rutin sebagai pekerja. Tetapi liburan tidak selalu dilakukan setiap minggu mengingat akan semakin banyak pengeluaran jika sering keluar rumah. Sebagian pekerja lebih suka menghabiskan waktu di rumah majikan guna menghindari semakin banyak pengeluaran.⁴² Pengeluaran dapat dikategorikan rendah, hal ini mengingat bahwa tujuan bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga di negara Indonesia.

Keadaan tempat tinggal tenaga kerja migran wanita di Singapura dalam kategori layak. Hal ini disampaikan oleh mbak Siti sebagai salah satu tenaga migran wanita Indonesia di Singapura. Sebagai asisten rumah tangga maka tempat tinggal pekerja migran wanita satu rumah dengan fasilitas yang sama dengan majikan. Tempat tidur bagi pekerja migran wanita menempati salah satu kamar diantara kamar lainnya. Walaupun kamar tidak sama persis dengan majikan tetapi menurut mbak Siti dalam kategori layak.

Fasilitas tempat tinggal pekerja migran wanita di Singapura dalam kategori lengkap. Fasilitas tempat tinggal tenaga kerja migran wanita di Singapura sama dengan fasilitas majikan.

⁴¹ Azis Husaini, "Begini Cerita Tenaga Kerja Migran di Singapura," *KONTAN.CO.ID (Online)*, Desember 11, 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-cerita-tenaga-kerja-migran-di-singapura>.

⁴² Wawancara dengan Siti, salah satu pekerja di Singapura pada tanggal 17 Juli 2018.

3. Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita di Hongkong

Kesejahteraan dengan indikator pendapatan, dari 50 informan menyatakan bahwa pendapatan dikategorikan tinggi karena pendapatan yang dihasilkan diatas Rp.10.000.000,- per bulan. Pendapatan tersebut dikategorikan sangat besar, hal ini karena rata-rata dari tenaga migran melanjutkan kontrak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya dari penghasilan yang didapatkan maka perkerja migran berusaha untuk membatasi pengeluaran, mengingat kebutuhan putra putri di Indonesia menjadi prioritas utama.⁴³ Pemerintah Hongkong juga sudah menetapkan upah buruh minimum (MAW) untuk buruh migran sektor rumah tangga sebesar HK\$ 100 dan kenaikan HK\$ 16 untuk uang makan seandainya majikan tidak menyediakan makan per bulannya.⁴⁴ Selanjutnya dikutip dari suara.com.hk, untuk semua buruh migran di Hongkong yang kontrak kerjanya dimulai pada 30 September 2017 dan seterusnya berhak atas upah minimum sebesar HK\$ 4410 dan uang makan HK\$ 105. enaikan upah minimum akan memberikan tambahan pendapatan bagi buruh migran di Hongkong.

Sedangkan untuk indikator konsumsi/pengeluaran keluarga buruh migran wanita di Hongkong selalu berusaha menekan sedikit mungkin pengeluaran. Pekerja migran wanitasetiap minggu diberikan hari libur oleh para majikan. Victoria Park yang merupakan taman tersebsar di Hongkong menjadi tempat berkumpulnya pada buruh migran di hari Minggu pagi. Apabila setiap minggu melakukan kegiatan liburan, makan bersama dan berbagi cerita tentang di taman Victoria maka akan banyak pengeluaran yang harus ditanggung oleh para pekerja migran. Hal yang harus dilakukan oleh buruh migran agar konsumsi tidak terlalu besar setiap bulannya maka buruh migran itu sendiri yang harus mampu membatasi pengeluaran dan tidak harus setiap minggu memanfaatkan melakukan liburan di taman victori.⁴⁵

Keadaan tempat tinggal buruh migran di Hongkong dalam kategori sangat layak mengingat pekerjaan sebagian besar sebagai asisten rumah tangga atau merawat orang tua maka tempat tinggal serumah dengan majikan. Sebagian besar majikan memiliki rumah layak dan sangat layak dengan fasilitas baik dan pekerja migran wanitamenempati salah satu kamar di rumah majikan.⁴⁶

⁴³ Wawancara dengan Irma salah satu pekerja Indonesia di Hongkong pada tanggal 16 Agustus 2018.

⁴⁴ M. Irfan Ilmie dan Fitri Supratiwi (ed.), "ANTARA: Gaji-tunjangan makan TKI Hong Kong naik," *ANTARA News (Online)*, Oktober 2, 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/655873/gaji-tunjangan-makan-tki-hong-kong-naik>.

⁴⁵ Wawancara dengan Irma salah satu buruh migran di Hongkong pada tanggal 17 Agustus 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Tatik salah satu buruh migran di Hongkong pada tanggal 15 Agustus 2018.

Fasilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai domisili pekerja migran wanita di Hongkong yang harus tinggal bersama dengan majikan. Namun dikarenakan ketentuan tersendiri dalam perjanjian kerja hanya menyebutkan bahwasanya majikan memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi pekerja. Standar akomodasi yang “layak” ini tidak serta merta layak akan tetapi banyak pekerja rumah tinggal tinggal dalam kondisi tidak memadai. Persatuan perlindungan buruh migran mengatakan tidak semua tenaga kerja migran mendapatkan akomodasi dengan standar yang dikatakan layak tersebut, beberapa diantaranya terpaksa tidur di tempat yang tidak layak seperti WC, Balkoni, atau ruang pakaian yang mana bisa membahayakan keselamatan mereka.⁴⁷

Tetapi karena tuntutan para serikat pekerja yang selalu berusaha memenuhi hak para pekerja migran wanita terutama pekerja wanita maka hal tersebut di atas sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Bahkan beberapa buruh migran mendapat fasilitas yang sama dengan majikan termasuk fasilitas AC di kamar mereka.⁴⁸ Uraian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran yang baik terhadap kesejahteraan buruh migran. Tetapi walau demikian beberapa buruh migran di Hongkong tidak semua bergabung dengan serikat pekerja, dengan alasan selanjutnya kontak pada tahun sebelumnya dengan majikan yang sama.

Konsumsi/ pengeluaran keluargapekerja migran wanita di Hongkong dalam kategori kecil. Hal ini disebabkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok pekerja sebagian sudah ditanggung oleh majikan. Misalnya kebutuhan makan sehari-hari disediakan oleh majikan. Kebutuhan kesehatan ditanggung asuransi dan kebutuhan sandang lebih banyak menggunakan baju dari Indonesia. Taman di Hongkong sangat menarik unruk dikunjungi setiap minggu, tetapi akan menjadi pertimbangan untuk berkunjung, mengingat tujuan menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Indonesia.⁴⁹ Besar kecilnya pengeluaran di Hongkong tergantung masing-masing individu dan ada banyak pengendali dari sesama teman seperjuangan untuk saling mengingatkan.

Keadaan tempat tinggal pekerja migran wanita di Hongkong dalam kategori layak, hal ini karena tempat tinggal sama dengan majikan. Walaupun kamar berbeda dengan majikan secara umum dalam kategori layak.

⁴⁷ “PRT di Hong Kong Dipaksa Tidur di Toilet,” *Deutsche Welle (DW)*, last modified Mei 12, 2017, diakses Agustus 18, 2019, <https://www.dw.com/id/prt-di-hong-kong-dipaksa-tidur-di-toilet/a-38816787>.

⁴⁸ Wawancara dengan Tatik salah satu buruh migran di Hongkong tanggal 16 Juli 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan Idah salah satu buruh migran di Hongkong, tanggal 15 Juli 2018.

Fasilitas tempat tinggal tenaga kerja migran wanita di Hongkong dalam kategori layak. Fasilitas tempat tinggal di rumah majikan di Hongkong lebih layak dari rumah Indonesia.⁵⁰

C. Peranan *Indonesian Migrant Worker Union* terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita di Taiwan, Singapura dan Hongkong

1. Peranan Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita di Taiwan

Serikat Pekerja di Taiwan bersama dengan IPIT⁵¹ memperjuangkan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja migran Indonesia di Taiwan, bahwa tenaga kerja di Taiwan perlu memahami hak-haknya jika mengalami kecelakaan saat bekerja yakni sebagai berikut:

- a) Mendapatkan bantuan pengobatan ketika sakit oleh majikan
- b) Izin sakit karena kecelakaan kerja dibayar penuh;
- c) Pemutusan kontrak tidak bisa dilakukan ketika pekerja dalam keadaan sakit dan harus tetap membayar gaji sesuai kontrak
- d) Mengajukan ganti rugi terhadap kemalangan yang menimpa, seperti cacat.
- e) Ketika pekerja meninggal, maka hak yang dapat diminta ialah gaji yang bersangkutan, sampai pengurusan pemakaman.

Indonesia juga memiliki rumah perlindungan pekerja migran di Taiwan. Shelter didirikan dalam rangka memberikan perlindungan awal bagi Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan, agar terhindar dari kasus *human trafficking*⁵². Salah satu tenaga kerja yang sudah memanfaatkan rumah perlindungan tenaga kerja migran di Taiwan adalah Yeti (33 tahun) Pekerja Migran asal Indramayu yang sudah 5 bulan 20 hari tidak mendapatkan gaji dari majikannya. Terdapat 4 shelter penampungan TKI dibawah binaan KDEI Taipei. Masing-masing berada Touroyuan, Zhongli, Taichung, Kaosiung, dengan kapasitas 20-25 orang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa peran serikat pekerja secara sinergi bersama pemerintah Indonesia dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani masalah tenaga migran wanita Indonesia di Taiwan dengan memberikan;

- a) pendampingan bagi TKW Indonesia dalam penanganan masalah
- b) secara intens memberikan pendidikan

⁵⁰ Wawancara dengan Tatik buruh migran Indonesia di Hongkong, tanggal 16 Juli 2018.

⁵¹ Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan adalah komunitas yang dibentuk oleh Pekerja di Taiwan yang tergabung dalam media sosial Facebook.

⁵² Pendapat Bapak Soes Hindratno Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 27-4-2018.

- c) meningkatkan kesejahteraan buruh migran melalui program pemberdayaan ekonomi.⁵³

hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang, bahwa buruh migran berhak bergabung dalam sebuah serikat pekerja, serta mewujudkan kebebasan, keterbukaan, serta kemandirian untuk mendapatkan hak mereka.⁵⁴

2. *Peranan Indonesian Migrant Worker Union (IMWU) terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita di Singapura*

Serikat pekerja membantu buruh migran untuk meminta gaji buruh yang belum terbayar dan menampungnya pada tempat yang telah disediakan serikat yang membela hak tenaga kerja *Transient Workers Count Two (TWC2)*. Rumah singgah bertingkat yang memiliki delapan blok ini, termasuk 18 tingkat yang baru selesai Januari tahun lalu, khusus diperuntukkan bagi para pekerja kelas bergaji rendah dari Bangladesh, India, Myanmar, China, dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia.⁵⁵ Dikutip dari CNN Internasional Indonesia,⁵⁶ Ternyata persoalan upah masih menjadi masalah upah masih melanda. Beberapa masalah yang dihadapi pekerja migran menjadikan motivasi untuk bergabung dengan serikat pekerja termasuk IMWU. Serikat pekerja membantu hak-hak pekerja migran agar dipenuhi sesuai dengan kesepakatan antara tenaga kerja migran dan majikan. Selanjutnya

Menteri Luar Negeri Indonesia mengeluarkan aplikasi untuk memberikan layanan berupa perlindungan untuk pekerja yang berada. Pertama adalah *Aplikasi Safe Travel*, sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam membantu menangani permasalahan yang dihadapi TKI. Aplikasi ini dapat memberikan bantuan ketika pekerja dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, upaya melakukan integrasi data-data terkait TKI dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan terakhir yang ketiga yaitu, aplikasi online PPTKIS sebagai mitra usaha Singapura.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja antara serikat pekerja dan pemerintah dalam menangani masalah tenaga migran wanita Indonesia di Singapura dengan memberikan;

⁵³ Fenny Sumardiani, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (Desember 1, 2014): 257, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3579>.

⁵⁴ UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Point 17

⁵⁵ Redaksi Tempo.co, "Cara Singapura Mengontrol Pemandokkan Pekerja Migran," *Tempo.co (Online)*, Agustus 18, 2015, <https://dunia.tempo.co/read/692961/feature-cara-singapura-mengontrol-pemandokkan-pekerja-migran+&cd=1&chl=en&ct=clnk&gl=id>.

⁵⁶ Deddy Sinaga, "Pelik dan Tercekik, Nasib Buruh Migran di Singapura," *CNN Indonesia (Online)*, Februari 26, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180226022446-106-278741/pelik-dan-tercekik-nasib-buruh-migran-di-singapura>.

1. pendampingan bagi TKW Indonesia dalam penanganan masalah
2. secara intens memberikan pendidikan
3. meningkatkan kesejahteraan buruh migran melalui program pemberdayaan ekonomi.⁵⁷

3. *Peranan Indonesian Migrant Worker Union(IMWU) terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita di Hongkong*

Aktivis perempuan IMWU di Hongkong Ibu Sringatin menyatakan untuk melakukan pengajuan hak bagi pekerja Indonesia sebagai ART agar mendapatkan hak ke luar rumah. Hal ini terjadi ada beberapa tenaga kerja migran wanita dari Indonesia didapati belum mendapatkan tempat tinggal yang layak bersama majikan. Sementara juga terdapat beberapa tenaga kerja migran wanita dari Indonesia yang mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang sudah layak bersama majikan termasuk fasilitas AC di kamar pekerja migran. Serikat pekerja juga mendampingi Erwiana Sulistyaningsih yang mendapat perlakuan buruk dari majikan. Serikat pekerja bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk kementerian luar negeri Indonesia di Hongkong juga menyediakan fasilitas perpustakaan. Hal ini disediakan bagi tenaga kerja migran dari Indonesia yang ingin menghabiskan waktu libur di luar rumah majikan dengan membaca buku yang telah dikoleksi di perpustakaan. Ternyata animo pekerja migran Hongkong cukup tinggi menambah wawasan dengan membaca buku. Sehingga peran serikat pekerja dalam menangani masalah tenaga migran wanita Indonesia di Taiwan dengan memberikan:

1. pendampingan bagi TKW Indonesia dalam penanganan masalah
2. secara intens memberikan pendidikan
3. meningkatkan kesejahteraan buruh migran melalui program pemberdayaan ekonomi

Serikat pekerja juga terbukti mampu membantu dalam penyelesaian masalah TKI yang berada di luar negeri. Mereka ikut memperjuangkan keadilan untuk para buruh di negara orang. Mereka mengajukan berbagai usulan dan tuntutan untuk memberikan hak keadilan bagi rekan mereka. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ikatan persaudaraan sesama warga negara sangat kuat dan kepedulian terhadap sesama sangat tinggi.

⁵⁷ Fenny Sumardiani, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (Desember 1, 2014): 257, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3579>.

